

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat berkembang kearah yang lebih baik. Pembangunan tersebut mutlak dilakukan oleh negara manapun, baik oleh negara yang masih terbelakang, negara berkembang, maupun negara maju. Begitu juga dengan apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, pembangunan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan atau suatu kondisi yang diinginkan. Dengan kata lain pembangunan merupakan proses perubahan yang terkait dengan aktivitas rakyat yang terencana untuk mencapai tujuan bersama, terutama untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Pada hakekatnya pembangunan adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian dalam mencapai sasaran pembangunan harus melibatkan masyarakat dan pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, fasilitas dan dana sedangkan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang berupa prakarsa maupun

swadaya gotong royong pada setiap pembangunan. Paradigma baru dalam pembangunan menyebutkan bahwa saat ini banyak negara sedang berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang akan dapat dicapai namun harus diimbangi dengan mengatasi permasalahan pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan yang timpang dan ketidakseimbangan struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha dari semua pihak untuk mengentaskan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia sangat mendesak untuk ditangani. Secara kasat mata, khususnya di wilayah perkotaan, kondisi perkotaan miskin dapat dilihat dari mereka yang tidak memiliki sarana dan prasarana dasar, seperti perumahan yang memadai, kualitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni. Secara umum bahwa kemiskinan tidak semata-mata merupakan kondisi kekurangan pangan dan kekurangan aset produktif saja, tetapi juga ketidaktenangan dan terbatasnya partisipasi mereka dalam kegiatan kemasyarakatan. Menurut Fahrudin (2011:13) ketidakberdayaan sangat erat kaitannya dengan motivasi dan proses belajar. Akibatnya golongan rakyat miskin tidak memiliki akses yang memadai untuk menjadikan hidup mereka menjadi lebih layak. Selanjutnya, mereka terpaksa hidup dibawah standar, baik itu dari aspek ekonomi, pemenuhan kebutuhan fisik, sosial dan politik yang menyebabkan rakyat miskin tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat di tingkat kebijakan. Proses ini berlangsung saling terkait dan secara akumulatif melemahkan posisi mereka.

Menurut Fahrudin (2011:15-16) Ada 4 ciri atau gejala utama ketidakberdayaan :

1. Keadaan pasif atau kurangnya motivasi
2. Keterbelakangan belajar
3. Sikap mengalah
4. Ketidakberdayaan berkurang sejalan waktu

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakberdayaan mengarah pada suatu kondisi yang cenderung lemah dari aspek mental dan akademis, dari ketidakberdayaan juga tercermin sebuah optimisme akan terkikisnya kondisi ketidakberdayaan dari waktu ke waktu.

Dalam konteks Indonesia, kemiskinan dapat mengakibatkan bangsa ini menjadi sangat rapuh secara internal maupun eksternal. Secara internal kerapuhan tersebut ditandai dengan rendahnya taraf hidup layak masyarakat kita yang berdampak pada kualitas manusia –manusia Indonesia itu sendiri. Secara eksternal, kemiskinan dapat mengakibatkan bangsa ini tidak bisa bersaing dikancah internasional. Rendahnya pendapatan penduduk miskin menyebabkan produktivitas mereka yang sudah rendah memberikan beban ketergantungan bagi masyarakat. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensional. Rendahnya tingkat hidup yang seringkali dijadikan alat pengukur kemiskinan, pada hakekatnya hanyalah merupakan suatu mata rantai dari semua faktor yang mewujudkan sindroma kemiskinan. Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi yang mereka miliki.

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran, tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Menurut Soetomo (2011:69), pendekatan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberi kesempatan atau wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal.

Paradigma pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Proses *empowerment* terhadap kemiskinan merupakan persoalan global umat manusia. Perkembangan dunia yang tidak berimbang menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik baik antar negara, antar daerah, antar orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut Fahrudin (2011:41), Masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat yang dinamis dan aktif berpartisipasi dalam membangun diri mereka sendiri.

Proses pemberdayaan masyarakat semacam ini penting guna keberhasilan penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Bukan hanya itu, proses pemberdayaan masyarakat semacam ini diperlukan bagi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Meskipun berbagai program kemiskinan telah dilakukan, namun karena kemiskinan merupakan fenomena sosial dan gejala kemanusiaan oleh karena itu kebijakan penanggulangan kemiskinan tentu mempunyai keterbatasan. Dalam menanggulangi masalah kemiskinan pemerintah melakukan inisiasi mengajak elemen lain untuk memberikan kontribusi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perhatian pada masalah kemiskinan sebenarnya sudah lama dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah, seperti P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah), dan sebagainya. Salah satu program pemerintah yang sangat relevan untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu PNPM termasuk didalamnya BKM yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 per tanggal 30 Juli 2007 dalam keputusan tersebut dijelaskan tentang petunjuk teknis pelaksanaan PNPM melalui BKM dan sebagainya.

Upaya Pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemerintah yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat adalah Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM). Menurut Kusumo (2004), BKM pada prinsipnya adalah wadah sinergis masyarakat bagi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan di komunitasnya. Dalam melaksanakan misi pemberdayaan masyarakat, BKM menumbuhkembangkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat sebagai media belajar masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan secara mandiri. Fungsi BKM adalah sebagai wadah sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang mampu memfasilitasi kebutuhan dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang ada atau masyarakat miskin pada umumnya untuk dapat terus tumbuh, berkembang jaringan usahanya dan meningkatkan perekonomiannya.

Hampir di semua wilayah di Indonesia sudah terdapat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) salah satu daerah yang telah berhasil menerapkan BKM adalah kota Pekalongan, seperti yang terdapat dalam artikel “Kemiskinan Kota Pekalongan Jadi Sorotan Dunia “ Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Pekalongan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Walikota Pekalongan Basyir yang didampingi Kepala Bappeda, Ir Faisal menegaskan bahwa resep keberhasilan Kota Pekalongan dalam menekan angka kemiskinan adalah dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat, seperti aparat kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Kesejahteraan Masyarakat (LKM) dan PKK. “Dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat maka tidak akan terjadi upaya saling jegal karena mereka sudah berada dalam satu tim,”

tandasnya. Inti dari semua itu menurut Basyir adalah koordinasi ditingkat bawah. ( Dikutip dari : <http://www.pekalongankota.go.id/> )

Adanya kerjasama yang melibatkan seluruh peran serta masyarakat seperti aparat Kelurahan, BKM, LKM, dan PKK. Maka selanjutnya akan mampu menurunkan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Masih banyak dijumpai keluarga miskin pada awalnya di kota Pekalongan tapi setelah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa BKM akhirnya kemiskinan di kota Pekalongan menjadi berkurang. Inilah salah satu kota yang berhasil menerapkan program BKM. Pada tahun 2007 angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 27,9 %, dibanding tahun 2005. Tahun 2005 tercatat warga miskin sebanyak 31.461 Kepala Keluarga, tapi tahun 2007 turun menjadi 22.683 hal ini tidak terlepas dari program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat (sumber: [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id) )

Kota Malang merupakan daerah yang mengalami kemajuan pesat dalam hal pembangunan, namun disisi lain program pengentasan kemiskinan kota malang masih belum begitu signifikan menurunkan angka kemiskinan. Hal itu terlihat dari data BPS melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menyebutkan bahwa penerima raskin (beras miskin) dari RTS ( Rumah Tangga Sasaran) tahun 2011 sebanyak 26.732, lalu mengalami penurunan menjadi 20.359 pada tahun 2012 dan angka kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2010 sebesar 5,90 %. Walaupun tingkat kemiskinan sudah mulai menurun, namun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan ( sumber: data BPS bulan Oktober tahun 2012).

Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun Kota Malang merupakan salah satu daerah yang menerapkan program BKM. Pemberdayaan masyarakat melalui BKM Tanjungrejo sudah dimulai sejak tahun 2007. Penduduk miskin di Kelurahan Tanjungrejo menempati urutan teratas dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kota Malang dari data BPS menyebutkan bahwa RTS (Rumah Tangga Sasaran) 2008 sebanyak 1.865 dan mengalami penurunan sebanyak 18,12% menjadi 1.527 RTS (Rumah Tangga Sasaran) 2011. Walaupun tingkat kemiskinan sudah mulai menurun namun masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Selain itu sejak berdirinya BKM Tanjungrejo, Sukun belum memberikan dampak yang signifikan bagi penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Tanjungrejo. Berdasarkan pengamatan sementara masih terdapat banyak warga yang miskin, banyak anak putus sekolah, dan tuna wisma. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kelurahan Tanjungrejo Sukun masih belum sepenuhnya menurun, jika dikaitkan dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Pekalongan yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Kota Malang seharusnya bisa seperti Kota Pekalongan dalam upaya memberdayakan masyarakat lokal, sehingga akan mampu menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai **“Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya pemberdayaan masyarakat oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

## **D. Kontribusi Penelitian**

1. Bidang akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku pembangunan di masyarakat, terutama pemerintah Kota Malang mengenai peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), terhadap pembangunan di masyarakat yang tepat sasaran.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat dan sebagai bahan perbandingan serta dasar untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian, pandangan, kajian teoritis dan wawasan yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu “Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang”.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini mengenai fokus penelitian, situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, serta keabsahan data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, tujuan penelitian dan fokus penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan atas data yang dihasilkan dalam penelitian dan dikemukakan tentang saran-saran hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pembangunan

##### 1. Pengertian pembangunan

Pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti sadar, bangkit, dan berarti. Dalam kata kerja bangun juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Sehingga bisa dikatakan pembangunan meliputi bentuk, kehidupan, dan perilaku. Kata pembangunan telah menjadi bahasa dunia, keinginan bangsa-bangsa mengejar, bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing Suryono (2010:01). Perubahan ke arah progres adalah pembangunan, pembangunan masyarakat merupakan suatu realitas sosial pada fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat Soetomo (2011:27). Sejalan dengan perkembangan organisasi sosial, kapasitas teknologi yang dihasilkan oleh manusia juga mengalami peningkatan seiring perjalanan waktu, Syeiful (2011:207).

Pembangunan berarti upaya yang terus menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subyek dan obyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras dan dinamis sedangkan kedalam mampu menciptakan keseimbangan, Suryono (2010:66) Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya (Tjokrowinoto,

2004:8). Sejalan dengan itu, Mubyarto ( 2000:282 ) ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ,harus ada upaya keras untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. Salah satu tujuan pembangunan adalah mengentaskan kemiskinan, Menurut Suharto (2009:15) meskipun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional dan struktural. Semakin melembaganya partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan akan bermuara pada swakelola daerah secara mandiri. Meskipun demikian konsep mandiri bukanlah suatu konsep yang sempit dan statis, sekadar menempatkan kemampuan masyarakat lokal untuk membiayai pembangunan ,Suyono ( 2003: 7)

Menurut Sumodiningrat ( 2009:56 ), pembangunan sebagai proses perubahan struktur masyarakat yang berdasarkan kemampuan sendiri, mensyaratkan lima kegiatan pembangunan yang tak terpisahkan dan membentuk *circular flow* yaitu :

1. Produksi dan penciptaan lapangan kerja
2. Meningkatkan pendapatan guna
3. Meningkatkan tabungan yang berguna
4. Pembentukan modal
5. Perubahan teknologi

## **2. Administrasi pembangunan**

Perkembangan bidang administrasi semakin luas, setelah perang dunia II. Banyaknya negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang berhasil menjadi negara merdeka, menimbulkan gerakan baru mengisi kemerdekaan, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

melalui proses dan upaya pembangunan. Salah satu hal yang diperhatikan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat adalah modernisasi perekonomian yang sering diidentikan dengan pembangunan ekonomi Tjiptoherijanto (2010 : 127-128).

Pengertian Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian yaitu:

1. Administrasi  
Keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yg telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang/lebih untuk mencapai tujuan yg ditentukan sebelumnya
2. Pembangunan  
Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yg ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Rino A Nugroho (<http://rinoan.staff.uns.ac.id/files/2009/02/pengantar.pdf> )

Pembangunan khususnya pembangunan ekonomi dapat dipandang sebagai kebijakan publik, karena merupakan produk sektor publik dalam kerangka memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat. Pembangunan yaitu kebijakan publik yang multidimensi dan lintas generasi, karena mencakup dimensi ekonomi dan non ekonomi ( Tjiptoherijanto, 2010:132). Administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan (W.Riggs).

Peranan administrasi negara dalam hal ini menciptakan *delivery mechanism* yang mampu menjangkau rakyat sebanyak mungkin dan mempunyai pelayanan yang cukup baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, nutrisi, lingkungan dan lain sebagainya. Peranan administrasi negara dalam hal pembangunan kualitas non-fisik dapat digeneralisir yang memungkinkan berfungsinya *reard and punishment system* yang dapat membentuk jati diri yang berkualitas (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004 :79)

Salah satu tujuan penting pembangunan adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Keberhasilan dalam penyusunan rencana pembangunan tentunya tidak terlepas dari kondisi yang dapat dikendalikan dan tidak (Sudantoko, 2003:101). Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan warga desa dalam proses pembangunan. Bentuk partisipasi warga desa dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Basuki, 2006:121). Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik secara langsung maupun tidak langsung (Nurcholis, 2011:104).

### 3. Konsep Pembangunan

Menurut Suryono (2010 : 53-54) peta konsepsi pembangunan secara ensiklopedik dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Peta Konsep – Konsep Pembangunan

Konsep	Pendekatan	Orientasi
Pertumbuhan	Ekonomi	Negara-negara dunia
Rekonstruksi	Pemulihan ekonomi	Negara yang terlibat perang dunia II
Modernisasi	Iptek	Negara dunia ketiga
Westernisasi	Kebudayaan dan iptek	Negara dunia ketiga
Perubahan social	Sosial	Negara dunia ketiga
Pembebasan	Ekonomi-politik	Amerika latin
Pembaharuan	Iptek kemudian sosial, politik	Negara dunia ketiga
Pembangunan bangsa	Politik	Negara baru merdeka
Pembangunan nasional	Politik	ne Negara baru merdeka
Pengembangan	Politik	Indonesia
Pembinaan	Politik	Indonesia
Pembangunan	Campuran	Negara dunia ketiga

Sumber : Suryono (2010: 53-54)

Tabel tersebut menjelaskan tentang beberapa konsep pembangunan diantaranya :

a. Konsep pertumbuhan

Sebuah konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan berarti kenaikan pendapatan nasional yang nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun tahap- tahap pertumbuhan ekonomi diantaranya : tahap masyarakat tradisional, tahap transisional, tahap tinggal landas, tahap pematangan dan tahap konsumsi massa tinggi. Selain tahapan juga ada beberapa faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia.
2. Perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitasnya.
3. Kemajuan teknologi yaitu hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

b. Konsep rekonstruksi

Banyak negara telah mengalami kemerosotan ekonomi sebagai konsekuensi kondisi yang seharusnya memang terjadi dalam resiko percaturan ekonomi global. Upaya ini tidak ditujukan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara luas, melainkan menitikberatkan pada upaya membangun kembali perekonomian suatu negara.

c. Konsep modernisasi

Modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Perancis. Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi adalah perubahan teknik industri dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern yang dihasilkan oleh revolusi industri.

d. Konsep westernisasi

Konsep ini adalah analog dari modernisasi. Hal ini didukung oleh pendapat bahwa sejarah modernisasi yang bersumber dari revolusi industri di Inggris dan Perancis merupakan produk dunia barat (westernisasi). Akibatnya secara psikologis apapun yang terjadi pada negara- negara di dunia, pertumbuhan kebudayaannya selalu diwarnai oleh ciri-ciri barat.

e. Konsep perubahan sosial

Diartikan sebagai perubahan kelembagaan masyarakat, yaitu perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai sosial, sikap dan prilaku kelompok.

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Perubahan

Bentuk perubahan	Metode	Lingkungan
Evolusioner	Tidak dikendalikan	Permisif/ semu/ serba boleh
Revolusioner	Dikendalikan, tidak dikendalikan	Lingkungan dimanipulasi
Dialektika	tidak dikendalikan	Permisif
Dipaksakan	Dikendalikan	Memmanipulasi lingkungan
Terkendali	Dikendalikan	Permisif

Sumber : Suryono (2010 :55)

Ada lima bentuk perubahan sosial, diantaranya :

1. Perubahan evolusioner : perubahan lambat yang tidak dikendalikan, dengan lingkungan.
2. Perubahan revolusioner : yaitu perubahan cepat yang bisa dikendalikan dan bisa juga tidak, dengan kondisi yang dimanipulasikan.
3. Perubahan dialektika : yaitu perubahan proses aksi reaksi yang tidak dikendalikan, dalam lingkungan permisif.
4. Perubahan yang dipaksakan : yaitu perubahan yang direayasa, dikendalikan dengan memanipulasi kondisi dan situasi lingkungan.
5. Perubahan terkendali : yaitu perubahan yang sengaja dikendalikan dengan lingkungan yang permisif.

f. Urbanisasi

Mobilitas fisik yang pada gilirannya mempengaruhi mobilitas sosial. Dengan terjadinya mobilitas, maka akan memperoleh pengalaman baru sebagai poses belajar. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Partisipasi media merupakan faktor pengganda dan penggerak mobilitas.

g. Konsep pembebasan

Mengajarkan bahwa pembangunan bermakna sebagai proses penilaian kembali terhadap keadaan setiap kelompok masyarakat dan mengadakan perbaikan kualitatif, baik secara kelompok maupun individu.

h. Konsep pembaharuan

Merupakan salah satu diantara bentuk proses sosial yang erat berkaitan dengan modernisasi dan perubahan sosial. Pembaharuan dan modernisasi di dorong oleh penemuan-penemuan ilmiah. Istilah inovasi biasanya digunakan untuk menunjukkan penciptaan teknik unggul produksi dan penerapan teknik import dari luar.

i. Konsep pembangunan bangsa

Merupakan salah satu aspek dari konsep pembangunan multi dimensional sebagai bentuk perubahan sosial yang tidak hanya menyangkut pembangunan bangsa saja melainkan juga pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, serta hubungan antar bangsa.

j. Konsep pembangunan nasional

Konsep ini lebih erat hubungannya dengan konsep pembangunan bangsa, khususnya di bidang politik.

k. Konsep pengembangan

Sering dikaitkan dengan istilah negara yang sedang berkembang berdasar pendekatan antropologis negara ini dianalogikan dengan kondisi masyarakat primitif yang kemudian diubah menjadi masyarakat sederhana.

l. Konsep pembinaan

Merupakan proses pembongkaran pola pikir lama yang dianggap keliru, yang selama itu mengendalikan diri bagi yang bersangkutan.

m. Konsep pembangunan

Dianggap sebagai perubahan sikap hidup yang semakin rasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat. Para perencana

pembangunan sangat dipengaruhi oleh anggapan bahwa pembangunan berarti pertumbuhan ekonomi. Salah satu pendekatan pembangunan yang sangat relevan saat ini adalah dengan pemberdayaan masyarakat.

#### 4. Konsep Peran

Menurut Wikipedia (2012) yang dimaksud dengan teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teori ini menempatkan persoalan-persoalan berikut mengenai perilaku sosial:

1. Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi diantara posisi khusus heterogen yang disebut peran
2. Peran ditempati individu yang disebut akto
3. Peran sosial mencakup bentuk perilaku wajar dan diizinkan, selanjutnya dibantu oleh norma sosial yang umum diketahui sehingga mampu menentukan harapan
4. Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran
5. Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial yang dianggap tidak sah
6. Antisipasi hadiah dan hukuman, serta kepuasan bertindak dengan cara proporsional, menjadi sebab para agen patuh terhadap persyarata peran

Sejalan dengan itu, Kekuasaan peran adalah kemampuan untuk memberlakukan sanksi atas mereka yang tidak mematuhi perintah-perintah kita. (Mitchell, 19: 2002 )

Pemberdayaan tidak mengakibatkan hilangnya kekuasaan, melainkan hanya mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara menggunakannya.

Pemberdayaan menuntut perluasan peran wewenang dan kekuasaan dan

bertambahnya keluwesan tentang bagaimana dan oleh siapa peran-peran itu akan dilakukan. Pemberdayaan berarti upaya menemukan keseimbangan yang tepat antara struktur dan pengendalian manajemen yang longgar versus yang ketat.

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).

Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Proses pemberdayaan bergantung pada dua hal diantaranya : (Suharto 58: 2005)

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis melainkan dinamis.

Pemberdayaan merupakan upaya berupa proses, strategi, program atau metode yang ditujukan untuk membantu masyarakat lokal menuju pada kondisi sosial yang lebih baik melalui pendistribusian kembali kekuatan yang dibutuhkan dan mengaturnya menjadi simbol-simbol yang mensejahterakan mereka (Juhari, 2011 : 96). Menurut Suhendra (2006: 75) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa agar mampu berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini menekankan pada peran serta masyarakat.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, baik kebebasan mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Suyanto (2005 : 169 ) pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat marginal merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Setiawan (2012:284) mendefinikan pemberdayaan sebagai proses penguatan sisi-sisi kelemahan dan meningkatkan sisi-sisi positif semua pelaku pembangunan baik komponen masyarakat, organisasi, birokrasi dan lembaga hukum yang dilakukan secara adil, sistematis, terkoordinasi dan berkelanjutan. Sebenarnya masalah pemberdayaan sudah digalakkan pemerintah sejak dulu seperti yang disampaikan Suyono (2003:45) yaitu : Dukungan terhadap usaha pemberdayaan, khususnya pemberdayaan perempuan, mempunyai sejarah yang panjang sejak tahun 1995. Program dukungan yang pertama dilakukan adalah bekerja sama dengan BKKBN dan dimulai dengan gerakan nasional sadar menabung yang dimulai pada tanggal 2 oktober 1995.

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan,

terutama di negara-negara yang berkembang. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat. Paradigma baru penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis, partisipatif, demokratis, tertib hukum dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pendekatan yang harus digunakan dalam penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembangunan Sumodiningrat (2009:48).

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas individu, kelompok atau dengan kata lain perubahan menuju kondisi atau posisi yang lebih baik. Perubahan dalam dimensi pemberdayaan mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan perilaku (Sutiah, 2003:39). Pemberdayaan merupakan pola pembangunan yang berpusat pada rakyat dan ditujukan untuk membangun kemandirian masyarakat (Zubaedi, 2007:97).

## **2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut suharto (2005:60) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal misalnya

persepsi mereka sendiri maupun kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.

Tujuan pemberdayaan menurut Mintarti (2011) diantaranya:

- a. Memberdayakan masyarakat bertujuan "mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri" atau
- b. "membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri" (*to help people to help themselves*)
- c. Bekerja dengan masyarakat (*working with people*) (Juhari, 2011:98) Pemberdayaan seharusnya lebih diarahkan pada upaya kolektif yang ditujukan untuk membantu masyarakat lokal menjembatani isu-isu sosial dengan kebutuhan mereka melalui potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri, demokratisasi, kesetaraan masyarakat dengan pemerintah, kebebasan berbicara, kebebasan berkeaktifitas, hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, hak untuk menikmati jerih payah sebagai buah pembangunan adalah sekaligus tujuan yang akan dituju oleh gerakan pemberdayaan masyarakat (Suhendra, 2006:85-86).

Menurut Suhartini (2005:7) tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman melalui suatu upaya penanganan terpadu, baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
- b. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya.
- c. Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian warga.

Menurut Hikmat (2010:04) pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini akhirnya menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan adil dan beradab yang terwujud dalam berbagai medan kehidupan : politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan lain sebagainya (Nasirin, 2010:98).

Sektor swasta dan masyarakat umum mendorong dan meningkatkan kemampuan (memberdayakan ) masyarakat miskin agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial dan politiknya, mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi dan mampu secara mandiri mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, Sudarwati ( 2009 :44 )

### **3. Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat**

Adapun prinsip pemberdayaan menurut Mashoed (2004 :31) diantaranya:

1. Partisipasi  
Bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan dimulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian , pengawasan dan pelestarian.
2. Keswadayaan  
Pengembangan program didasarkan atas pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat dan dilaksanakan dengan mendayagunakan seoptimal mungkin potensi dan kemampuan lokal.
3. Transparan dan akuntabel  
Informasi yang berkenaan dengan pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas.
4. Keterpaduan  
Program yang dikembangkan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Otonomi dan desentralisasi  
Masyarakat desa bersama pemerintah desa diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas dalam pengelolaan kegiatan.
6. Kesetaraan gender  
Kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

#### 7. Keberlanjutan

Pengelolaan program yang mampu menumbuhkan peran serta masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan kegiatan dalam pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut Suharto (2005 : 68-69 ) menyimpulkan prinsip pemberdayaan masyarakat dari beberapa penulis yaitu :

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus saling bekerja sama.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau kesempatan-kesempatan
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh dari pengalaman hidup
- e. Solusi berasal dari situasi khusus yang beragam
- f. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri : tujuan, cara dan hasil mampu dirumuskan mereka sendiri.
- g. Jaringan – jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting.

Sejalan dengan itu Fahrudin ( 2011:17-18) menyimpulkan prinsip dan asumsi pemberdayaan antara lain:

- a. *Empowerment* adalah proses kolaboratif.
- b. Proses *empowerment* melihat sistem klien sebagai peranan penting.
- c. Klien harus menerima diri mereka sendiri untuk mampu mempengaruhi perubahan.
- d. Tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam *empowerment*.
- e. Proses *empowerment* adalah proses yang dinamis, sinergi selalu berubah dan berevolusi, karena masalah selalu mempunyai banyak cara pemecahan.

#### 4. Upaya dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mashoed (2004 :40 ) upaya pemberdayaan dapat dilakukan beberapa langkah :

1. Strategi dasar sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan.
2. Kerangka rencana makro yang membuat berbagai sasaran yang harus dicapai.

3. Masyarakat sendiri harus memiliki perkiraan sumber-sumber pembiayaan.
4. Kerangka dan perangkat kebijakan berupa program pembangunan pedesaan.

Lebih lanjut menurut Sumodiningrat yang dikutip Mashoed (2004:40) upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan adalah :

1. Bantuan dana sebagai modal.
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi rakyat.
3. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat.
4. Pelatihan bagi aparat dan masyarakat.
5. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi rakyat.

Lebih jauh menurut Nugroho (1999:32) strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan memang perlu mendapat perhatian serius caranya adalah dengan memacu pertumbuhan ekonomi, menyediakan fasilitas kredit bagi lapisan miskin, dan membangun prasarana pedesaan. Menurut Mashoed (2004:30), untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan, diperlukan strategi berupa peningkatan kinerja manajemen, pembinaan sumber daya manusia, pembinaan usaha makro, efisiensi pelaksanaan program, mengurangi risiko yang dihadapi keluarga miskin dan melindunginya “.

Suharto (2009: 66-67) dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting* ) yaitu :

1. Strategi Makro  
Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling. Tujuannya membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

2. Strategi Mezzo  
Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan yang menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Tujuannya meningkatkan kesadaran, pengetahuan agar mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.
3. Strategi Makro  
Pendekatan ini disebut juga strategi sistem besar, karena sasaran diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.

Sejalan dengan itu Fahrudin (2011: 18-19) mengungkapkan bahwa secara garis besar, strategi dan teknik *empowerment* dilihat dari tiga bentuk intervensi yaitu mikro, mezzo dan makro. Intervensi mikro ditujukan kepada individu dan keluarga, intervensi mezzo ditujukan kepada kelompok kecil sedangkan intervensi makro ditujukan kepada organisasi dan masyarakat. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan Suharto (2005 : 67-68) :

1. Pemungkinan : menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok.
4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Ada 3 strategi pemberdayaan menurut Hikmat ( 2010:19 ) yaitu :

- a. Strategi Tradisional  
Menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
- b. Strategi *Direct-Action*  
Membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak.

c. Strategi Transformatif

Menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum mengidentifikasi diri sendiri.

## 5. Dimensi dan indikator pemberdayaan

Jika akan mengukur suatu pemberdayaan berjalan dengan baik atau tidak maka perlu indikator. Tinggal membandingkan kriteria normatif dengan realita. Adapun indikator masyarakat berdaya menurut Suhendra (2006:86) adalah :

1. Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat.
2. Dapat berjalannya “ *bottom up planing*”
3. Kemampuan dan aktivitas ekonomi
4. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga
5. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa ada tekanan.

Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional maka perlu diketahui indikator keberdayaan yang menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan dimensi kekuasaan yaitu menurut Suharto (2005:63) :

- a. Kekuasaan di dalam (*power within*)
- b. Kekuasaan untuk (*power to*)
- c. Kekuasaan atas (*power over*)
- d. Kekuasaan dengan (*power with*)

Tabel 3. Indikator Keberdayaan Menurut Suharto (2009: 65) :

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan ekonomi	Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan	Kemampuan kultural dan politis
Kekuasaan di dalam: meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi positif terhadap kontribusi dirinya</li> <li>• Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .Kepercayaan diri dan kebahagiaan</li> <li>• Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender</li> <li>• Keinginan terlibat dalam proses budaya, hukum dan politik</li> </ul>
Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan memperoleh akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses terhadap pelayanan keuangan mikro</li> <li>• Akses terhadap pendapatan</li> <li>• Akses terhadap aset-aset produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .Keterampilan</li> <li>• Status kesehatan dan gizi</li> <li>• Ketersediaan pelayanan kesejahteraan public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilitas dan akses terhadap dunia diluar rumah</li> <li>• Pengetahuan mengenai proses hokum</li> </ul>
Kekuasaan atas : Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan</li> <li>• Kontrol atas akses produktif dan kepemilikan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya</li> <li>• Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya</li> <li>• Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik</li> </ul>
Kekuasaan dengan : Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern</li> <li>• mampu memberi gaji terhadap orang lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penghargaan tinggi dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga</li> <li>• tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis</li> <li>• tindakan bersama untuk membela orang lain</li> <li>• Partisipasi dalam gerakan yang bersifat kultural, politis dan hukum</li> </ul>

Sumber : Buku Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia oleh Suharto 2009

Tabel tersebut merangkum indikator pemberdayaan diantaranya :

1. Kebebasan mobilitas : kemampuan individu untuk pergi keluar rumah. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian
2. Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari.
3. Kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga : seperti, jika ada yang melarang mempunyai anak lagi, atau melarang kerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik : mengetahui pegawai kelurahan, pentingnya surat nikah.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan proter-protes : protes terhadap suami yang memukul istri
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : memiliki rumah, aset dan tabungan. Suharto (2005: 64)

## 6. Pendekatan pemberdayaan

Menurut Mashoed (2004:30) ada pendekatan tri daya untuk melindungi keluarga miskin dari ketidakberdayaan :

1. Pemberdayaan manusia yang diarahkan pada :
  - a. Peningkatan sumber daya manusia. Baik fisik maupun non fisik.
  - b. Peningkatan pendidikan, kesehatan dan memberikan perlindungan serta jaminan sosial.
2. Pemberdayaan Usaha
  - a. Meningkatkan kesempatan kerja, kegiatan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan.
  - b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan
  - c. Penyediaan modal kerja dalam bentuk pinjaman.
3. Pemberdayaan lingkungan  
Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan serta lingkungan usaha, dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang memadai sehingga meningkatkan akses perekonomian dan pemanfaatan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Ada lima pendekatan menurut James Yen yang dikutip Suhendra (2006 :

87-88) yaitu:

1. Pergi ke mereka, tinggal diantara mereka, bekerja dengan mereka
2. Buat rencana bersama mereka, mulai dari yang mereka tahu, membangun dari yang mereka miliki
3. Mengajar dengan memberi contoh, belajar melalui mengerjakan

4. Bukan sekedar tambal sulam, tapi kegiatan terpadu dan bersistem
5. Bukan membantu dengan memberi tetapi memerdekakan

Menurut Mashoed (2004:40) upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan empat langkah :

1. Strategi dasar sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan.
2. Kerangka rencana makro yang membuat berbagai sasaran yang harus dicapai.
3. Masyarakat sendiri harus memiliki perkiraan sumber-sumber pembiayaan.
4. Kerangka dan perangkat kebijakan berupa program pembangunan pedesaan.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi kemiskinan.

### **7. Stakeholder Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha untuk membuat masyarakat menjadi mandiri. Sebagai program pembangunan yang sangat signifikan, pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk segera diimplementasikan ke dalam masyarakat. Di Indonesia sudah diterapkan program pemberdayaan sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu berupa BKM Badan keswadayaan Masyarakat. *Stakeholder* BKM yaitu pemerintah selanjutnya ke pemerintah desa dan ke masyarakat langsung.

#### **a. Teori Kelembagaan**

Lembaga merupakan pranata sosial yang diartikan sebagai sistem tata kelakuan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam hidup bersama. Dari beberapa definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga tidak selalu bersifat formal, tetapi juga termasuk kumpulan nilai dan norma yang sekalipun dapat dilihat secara nyata tetapi benar-benar diakui dan dipahami oleh masyarakat.

## b. Peranan Kelembagaan

Berbagai peranan lembaga lokal yaitu :

### 1. Informasi

Lembaga lokal menyajikan data sejumlah permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal, baik menyangkut permasalahan ekonomi dan sosial budaya serta mencoba menemukan alternatif pelayanan sosial yang dibutuhkan.

### 2. Moderator dan Fasilitator

Kadangkala terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Adanya kesenjangan ini akan menyebabkan terjadinya konflik antara kepentingan dengan kebutuhan masyarakat. Pada batas-batas tertentu, masyarakat ini tidak akan mendukung kegiatan pembangunan ini. lembaga lokal pun berkewajiban untuk dapat menjadi fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diadakan di daerahnya.

### 3. Advokasi

Kelembagaan masyarakat mewakili kepentingan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dari pihak-pihak tertentu. Ketika ada pihak lain (pemerintah lokal, pengusaha/developer, dll) yang menawarkan program kepada masyarakat, namun program tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, maka organisasi lokal atas nama masyarakat lokal akan melakukan upaya pembelaannya. Seperti dalam pembebasan tanah untuk kepentingan perumahan atau industri atau pembangunan industri yang polusinya dirasakan oleh masyarakat.

### 4. Pemberdayaan

Kelembagaan lokal melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat. Dengan adanya upaya pemberdayaan oleh organisasi lokal maka masyarakat secara swadaya dapat menyelesaikan permasalahannya baik menyangkut bidang ekonomis maupun sosial budaya dan politik.

## c. Konsep *Institutional Building*

Konsep *Institutional Building* merupakan konsep yang akan terus berkembang, konsep pengembangan kelembagaan merupakan sasaran yang terus berubah dari fokus pada pengembangan dan penguatan individu, organisasi dan penyediaan teknik dan manajemen pelatihan guna mendukung perencanaan yang integral dan proses pembuatan keputusan antar institusi. Dalam upaya penguat kelembagaan dapat

dilakukan dalam tiga tahapan seperti yang diungkapkan oleh Williem. Penguatan kelembagaan sebaiknya dimulai dari individu terlebih dahulu setelah adanya peningkatan pada individu maka penguatan dapat dilakukan pada level organisasi setelah itu pada level yang tertinggi, yaitu proses peningkatan kapasitas.

### C. Badan Keswadyaan Masyarakat

#### 1. Pengertian BKM

BKM sebagai institusi lokal yang dibentuk melalui program PNPM di desain sebagai institusi sukarela dengan demikian proses dan pembentukannya tidak banyak campur tangan pemerintah. Dibanding dengan program pemerintah yang lain, program ini lebih kental dengan nuansa pendekatan (Soetomo, 2012:172).

Dalam buku Pedoman Badan Keswadyaan Masyarakat Januari 2005 menjelaskan bahwa BKM merupakan lembaga masyarakat yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang dikelola dan dibangun berdasarkan nilai – nilai universal.

BKM adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. Disamping itu BKM mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan bersama. BKM adalah dewan pemimpin kolektif masyarakat penduduk kelurahan,

dan sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat kelurahan.

## 2. Tujuan BKM

Dalam buku pedoman teknis tinjauan partisipatif PNPM perkotaan (2007:02) BKM dibentuk sebagai lembaga pimpinan kolektif sebagai motor penggerak penumbuhan kembali *capital social* seperti antara lain solidaritas, kesatuan, gotong royong dan sebagainya. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan peran tersebut, BKM mengorganisasikan warga untuk merumuskan program jangka menengah tiga tahun dan rencana tahunan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan PJM dan rente Pronangkis kelurahan atau desa inilah BKM kemudian menyusun rencana kerja BKM sendiri.

Seiring perjalanan waktu, BKM akan mengalami perubahan-perubahan baik yang direncanakan maupun tidak. Begitu pula dengan program. Karena itu, dibutuhkan alat periksa untuk melihat dan memikirkan kembali perkembangan kelembagaan dan program yang dikerjakan. Melalui kegiatan tinjauan ulang secara partisipatif, BKM secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja diantara para anggota dan unit pengelola.

## 3. Peran dan Fungsi BKM

Fungsi BKM maenurut Soetomo ( 2012 : 172 ) ada dua yaitu :

1. Fungsi ke dalam yaitu sebagai media partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

2. Fungsi ke luar yaitu sebagai representasi masyarakat lokal dalam menjalin hubungan kerjasama dengan para *stakeholder*.

Peran pokok BKM adalah menilai dan memberikan persetujuan, serta mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan KSM, baik berupa Kelompok - Kelompok Usaha Bersama (KUBE), maupun kelompok pengelola pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. BKM mempunyai tanggungjawab untuk merealisasikan pengelolaan dana bergulir di masyarakat wilayah penerima bantuan.

Dalam penanganan tugas PNPM sehari-hari, BKM didampingi dan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah ( KMW) dan fasilitator kelurahan yang bertugas di lapangan. Secara terperinci, BKM bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut : Tim Badan Keswadayaan Masyarakat ( 2005)

1. Melakukan koordisasi dan pemantauan kegiatan dan oraganisasi kerja KSM dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan kegiatan pengembangan usaha.
2. Menyusun dan menetapkan kegiatan-kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diprioritaskan pendanaannya dan mengajukan kepada Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK).
3. Mengakaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan, sesuai dengan tahapan-tahapan pengerjaannya di lapangan.
4. Mengelola dana PNPM melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai unsur pelaksana pengelola keuangan BKM
5. Menjamin keterbukaan dalam penggunaan dana serta meningkatkan kesadaran akan hak yang sama untuk berperan serta.
6. Menyadarkan dan meyakinkan kaum perempuan dan generasi muda akan hak yang sama untuk berperan serta.
7. Menyediakan papan informasi di tempat yang mudah dijangkau dan mengumumkan daftar usulan KSM, laporan kemajuan fisik dan keuangan KSM dan laporan keuangan BKM.
8. Menyediakan kotak saran dan keluhan yang menyangkut kegiatan PNPM, kemudian menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan ke dalam kotak saran tersebut.
9. Memberikan penghargaan terhadap usulan proyek yang baik sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama KSM sebelum suatu kegiatan dilaksanakan.

#### 4. Proses Pembentukan BKM

BKM beranggotakan warga komunitas yang diakui komitmennya, seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK), tokoh masyarakat atau tokoh agama. Unsur aparaturnya daerah misalnya LKMD, dapat berpartisipasi dalam BKM dalam kapasitas pribadi. Pimpinan BKM harus dipilih dari dan oleh anggotanya.

Pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota BKM dilakukan melalui penyelenggaraan musyawarah tertinggi melibatkan seluruh anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kelompok swadaya masyarakat tertentu, maka anggota KSM itu gugur hak suaranya. BKM yang terbentuk akan disahkan notaris dengan biaya PJOK. Pertemuan-pertemuan BKM dapat dilakukan di tempat-tempat lain yang disepakati.

Unit Pengelola Keuangan (UPK), sebagai salah satu gugus tugas di BKM akan dibentuk untuk mencatat penyaluran dan pencairan dana kepada kelompok swadaya masyarakat, serta mengelola dana bergulir kelurahan. Kredit pengembangan usaha yang diterima oleh KSM harus dikembalikan berikut bunganya. Dana yang terkumpul kembali akan dipinjamkan kepada KSM-KSM peminjam berikutnya yang dipilih berdasarkan prinsip yang sama.

#### 5. Prinsip Dasar BKM

Pemanfaatan bantuan diarahkan agar dapat berlatih menggunakan dana itu, sebagai stimulan dalam pengembangan lebih lanjut dapat memanfaatkan

fasilitas *microfinance*. Dilakukan melalui bantuan dana yang dipergunakan untuk membiayai investasi sosial dan investasi ekonomi. Bantuan dana sepenuhnya untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang berlanjut (Nasirin, 2010:109)

Prinsip –prinsip dasar yang melandasi BKM (Tim Badan Keswadayaan Masyarakat, 2005) yaitu :

BKM adalah organisasi berdasarkan anggota aktif artinya : keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh BKM haruslah melibatkan seluruh anggota.

1. BKM adalah organisasi demokratis, dalam arti setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Proses-proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan partisipatif.
2. BKM adalah organisasi yang terbuka sehingga setiap warga masyarakat khususnya pihak-pihak yang termasuk kelompok-kelompok sasaran dan pihak-pihak yang dianggap mampu mengembangkan dan mencapai tujuan BKM, dapat dilihat dalam berbagai kegiatan BKM.
3. BKM adalah organisasi yang tidak membeda-bedakan orang atau tidak diskriminatif baik dari jenis kelamin, usia, status perkawinan, suku maupun agama.

Sejalan dengan itu, ada prinsip – prinsip P2KP yaitu :

Menciptakan peluang-peluang ataupun mekanisme-mekanisme agar nilai-nilai luhur yang sudah ada di warga dapat muncul dipermukaan, sehingga : pimpinan yang dipilih, pengambilan keputusan serta perbuatan/karya yang akan dilakukan oleh warga akan dilakukan sesuai dengan keyakinannya pada nilai-nilai luhur yang bersifat universal, baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai kemasyarakatan (Tim P2KP, 2007 :1)

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan suatu prosedur atau cara untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. Cara tersebut adalah langkah- langkah ilmiah sedangkan hasilnya adalah sebuah pengetahuan atau informasi (Zulganef, 2008:7). Sejalan dengan itu Nurul Zuriyah (2005:13) membagi jenis penelitian berdasarkan metodenya ada 4 yaitu Penelitian historis, penelitian filosofis, penelitian observasional dan penelitian eksperimental. Selanjutnya Basrowi dan Suwandi (2008:1) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Basrowi dan Suwandi, 2008:20).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model yang dikembangkan sangat beragam. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Nurul Zuriyah (2005:14) penelitian deskriptif berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu. Ciri-ciri penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan masalah aktual yang dihadapi sekarang dan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Jadi dalam penelitian ini akan dipergunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga diharapkan mampu menggambarkan fenomena-fenomena dan menganalisis hubungan-hubungan yang terjadi antar fenomena-fenomena yang terkait latar belakang masalah atau rumusan masalah, dan juga yang menjadi fokus penelitian ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan data yang akan diamati, dikumpulkan, diolah, dan dianalisa oleh peneliti dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah pusat perhatian yang bermaksud membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Basrowi dan Suwandi (2008:28) bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu: batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus; dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM) di Kelurahan Tanjungrejo, Sukun, Kota Malang:
  - a. Penguat kelembagaan
  - b. Upaya membangun jaringan kerjasama
  - c. Upaya sebagai mediator dan fasilitator
  - d. Upaya penyediaan modal, sarana dan prasarana

2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Tanjungrejo, Kec.Sukun, Kota Malang:

- a. Faktor pendukung
- b. Faktor penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan berkaitan dengan penelitian. Sedang situs penelitian merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan diteliti, sehingga data dan informasi yang akurat dan diperlukan dapat diperoleh. Lokasi penelitian ini di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Tanjungrejo Sukun Kota Malang dan peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan berdasarkan penelitian terdapat banyak warga yang miskin, banyak anak putus sekolah dan tuna wisma.

### **D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan asal darimana data tersebut diperoleh atau didapatkan. Keberadaan data adalah untuk dapat menyajikan sumber informasi sebagai pokok kajian atau alat analisis yang dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian sumber data tersebut dapat berupa informasi dan didukung dengan dokumen yang berupa data tertulis. Hal ini karena penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung (observasi) dalam memperoleh data bersifat tambahan.

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu:

a. Pengurus BKM yaitu :

1. Koordinator BKM Tanjungrejo Sukun : Andi Marsandi
2. Unit Pengelola Keuangan (UPK) : Sri Rahayuningtyas
3. Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo :  
Mumpuni

b. Masyarakat kelurahan Tanjungrejo Sukun kota Malang

1. Warga RT :3 RW :13 nama : Sri Winarsih
2. Warga RT : 5 RW :13 nama : Pak Pardi

2. Jenis data Sekunder

Merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti, yaitu data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya melewati satu pihak atau lebih yang bukan peneliti sendiri lakukan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah buku dan Situs-situs di internet . Data sekunder yang didapat peneliti berasal dari :

Buku panduan BKM dan PNPM, data BPS jumlah penerima BLT, Anggaran Dasar (AD ) BKM Tanjungrejo, PJM Pronangkis Kelurahan Tanjungrejo.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:93) metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksudkan itu, dalam penelitian digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang nyata., dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pengumpulan data merupakan prosedur standar dan sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### 1. *Observasi* (pengamatan)

Salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer (Basrowi dan Suwandi, 2008:93) sejalan dengan itu observasi adalah sebuah metode yang bersifat alamiah, dengan demikian pemahamannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari peneliti, dari pentingnya permasalahan dan sasaran umum dari penelitian. E. Koswara (2001:288) dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan tanjungrejo Sukun Kota Malang.

## 2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi dan Suwandi, 2008 :127). Tujuan kegiatan wawancara ini adalah untuk mendapatkan data dan meyakinkan atau memastikan data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif.

## 3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi, 2008:158).

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang merupakan alat yang memegang peranan penting dalam melakukan penelitian. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang dipakai adalah:

1. Peneliti: Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Basrowi dan Suwandi, 2008:158).
2. Pedoman Interview (*Interview Guide*): Dalam melakukan wawancara, peneliti harus menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan

peneliti dalam rangka mencari data yang diinginkan. Pedoman wawancara itu sendiri merupakan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang hendak diajukan kepada responden dalam penelitian.

3. *File Note* (buku catatan laporan): Catatan laporan yaitu catatan kecil yang diperoleh dari wawancara maupun pengamatan langsung guna mencatat data-data dan informasi yang terkait dengan menggunakan alat tulis atau alat-alat lain yang diperlukan seperti tape recorder atau kamera.

## G. Analisis Data

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah, kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian tersebut. Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (Oktafiyanti, 2011:43).

### 1. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan penyajian data, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

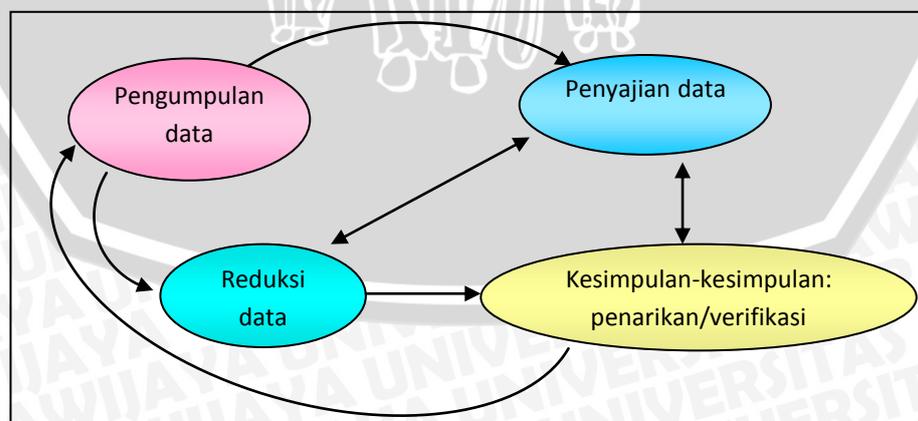
### 3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari penelitian sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data yang utuh selama penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, setiap data-data yang diperoleh mengenai bagaimana kinerja dan sistem manajemen BKM dalam pelaksanaan PNPM kepada masyarakat akan dilakukan dengan model analisis deskriptif dari Milles dan Huberman melalui reduksi data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Semua tahapan tersebut akan coba dianalisis secara lebih dalam agar memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Proses penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**

#### **Proses Analisis Data Model Interaktif**



Sumber: Miles dan Huberman, 1992

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kelurahan Tanjungrejo

###### a. Keadaan Geografi

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Adapun luas wilayah Kelurahan Tanjungrejo adalah 1.895 km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Bareng
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Bandungrejosari
3. Sebelah Barat : Kelurahan Bandulan
4. Sebelah Timur : Kelurahan Sukun

###### b. Kondisi Penduduk dan Sosial Kemasyarakatan

Gambaran umum penduduk dalam penelitian disusun berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana. Gambaran umum penduduk dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu:

###### 1) Jenis Kelamin

Karakteristik pertama obyek penelitian ini adalah responden berdasarkan jenis kelamin. Pada Tabel 4 dipaparkan komposisi obyek penelitian berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	14.582	48,59
2.	Perempuan	15.426	51,41
Jumlah		30.008	100

Sumber : Monografi Kelurahan (2012).

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa, dari total penduduk Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang, sebanyak 14.582 jiwa berjenis kelamin laki-laki (48,59%) dan sisanya sebanyak 15.426 jiwa berjenis kelamin perempuan (51,41%).

Sedangkan penduduk berdasar usia sebagaimana table di bawah ini :

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang**  
**Berdasarkan Rentang Usia**

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	Usia 0 – 15	6.602	21,97
2.	Usia 16 - 65	21.585	71,73
3.	Usia $\geq$ 66	1.904	6,30
Jumlah		30.091	100

Sumber : Monografi Kelurahan (2012)

Tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 30.091 penduduk Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang, sebanyak 6.602 jiwa (21,97%) berusia 0-15 tahun, sebanyak 1.904 jiwa (6,30 %) berusia  $\geq$  66 tahun, sementara sisanya yang merupakan jumlah penduduk terbesar berada dalam usia produktif yaitu 21.585 jiwa (71,73%) berusia 16 – 65 tahun.

Adapun penduduk berdasarkan pekerjaan sebagaimana table 6 di bawah ini :

**Tabel 6**  
**Jumlah Masyarakat Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang**  
**Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	430	6,22
2.	(PNS)	210	3,04
3.	ABRI	1.970	28,53
4.	Karyawan Swasta	995	14,40
5.	Wiraswasta/ Pedagang	32	0,46
6.	Tani	1.585	22,95
7.	Pertukangan	430	6,22
8.	Buruh Tani	440	6,37
9.	Pensiunan	-	0
10.	Nelayan	75	1,08
11.	Pemulung	738	10,73
	Jasa		
Jumlah		6.905	100

Sumber : Monografi Kelurahan (2012)

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa sebanyak 430 jiwa (6,22%) bekerja sebagai PNS, sebanyak 210 jiwa (3,04%) bekerja sebagai ABRI, sebanyak 995 jiwa (14,40%) bekerja sebagai wiraswasta/pedagang, sebanyak 32 jiwa (0,46%) bekerja sebagai tani, sebanyak 1.585 jiwa (22,95%) bekerja dalam bidang pertukangan, sebanyak 430 jiwa (6,22%) bekerja sebagai buruh, sebanyak 440 jiwa (6,37%) sebagai pensiunan, sebanyak 75 jiwa (1,08%) bekerja sebagai pemulung, sebanyak 738 jiwa (10,73%) bekerja dalam bidang jasa. Dan sisanya yang merupakan profesi terbanyak yang dimiliki oleh masyarakat Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang adalah karyawan swasta yaitu sebanyak 1.970 jiwa (28,53%).

Sejalan dengan hal di atas, pendidikan penduduk Kelurahan Tanjungrejo komposisinya sebagaimana tabel 7 di bawah ini :

**Tabel 7**  
**Jumlah Masyarakat Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun**  
**Kota Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Banyaknya (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	Taman Kanak-Kanak	1.260	41,46
2.	Sekolah Dasar	1.240	40,80
3.	SMP	228	7,50
4.	SMA/SMU	220	7,23
5.	Akademi/D3	46	1,53
6.	Sarjana	35	1,15
7.	Pascasarjana	10	0,33
Jumlah		3.039	100

Sumber: Monografi Kelurahan (2012)

Dari Tabel 7 dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang yaitu sebanyak 1.260 jiwa ( 41,46 %) berpendidikan TK, sebanyak 1.240 jiwa (40,80 %) berpendidikan SD, sebanyak 228 jiwa (7,50 %) berpendidikan SMP, sebanyak 220 jiwa (7,23 %) berpendidikan SMA/SMU, sebanyak 46 jiwa (1,53%) berpendidikan Akademi/D1-D3, sebanyak 35 jiwa (1,15 %) berpendidikan Sarjana, dan sisanya yang merupakan tingkat pendidikan yang paling sedikit dimiliki yaitu sebanyak 10 jiwa (0,33 %) berpendidikan Pascasarjana.

## 2) Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungrejo

Dalam aktifitas masyarakat Kelurahan Tanjungrejo didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang ada, yakni sebagaimana table 8 di bawah ini :

Tabel 8

**Jumlah Sarana Dan Prasarana Masyarakat Kel. Tanjungrejo  
Kecamatan Sukun Kota Malang**

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Prosentase (%)
1.	a. Kantor Kelurahan	Semi Permanen/	
2.	b. Prasarana Kesehatan:	Permanen	
	Puskesmas		
	UKBM (Posyandu)	Ada/Tidak	
	Poliklinik (Balai	1	
3.	Pelayanan Masyarakat)	1	
	c. Prasarana Pendidikan:		
	Gedung Sekolah PAUD	Ada/Tidak	
	Gedung Sekolah TK	7	
	Gedung Sekolah SD	9	
	Gedung Sekolah SLTP	1	
	Gedung Sekolah	-	
4.	SMA/SMU	-	
	Gedung Perguruan Tinggi		
	Prasarana Ibadah:	12	
	Masjid	26	
	Mushola	4	
	Gereja	1	
	Pura	-	
5.	Wihara	-	
	Klenteng		
	Prasarana Umum:	2	
	Olahraga	4	
	Kesenian/Budaya	13	
	Balai Pertemuan	-	
	Lainnya		
	<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sumber: Monografi Kelurahan (2012).

### c. Kondisi Pemerintahan Kelurahan Tanjungrejo

#### 1) Anggaran

**Tabel 9**

**Distribusi Program Dan Anggaran Yang Diterima Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang**

No.	Nama Program	Besar Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1.	PNPM (Pemerintah Pusat)	350.000.000	31,37
2.	PNPM (Provinsi)	12.000.000	1,07
3.	Kabupaten/Kota	753.500.000	67,56
Jumlah		1.115.500.000	100

Sumber: Monografi Kelurahan (2012).

Dari Tabel 9 dapat diketahui program dan anggaran yang diterima Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang adalah sebagai berikut. Anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (31,37%) pada program PNPM (Pemerintah Pusat), anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (1,07%) pada program PNPM (Pemerintah Provinsi), dan anggaran sebesar Rp. 753.500.000,- (67,56%) pada program Kabupaten/Kota. Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Tabel 10**

**Distribusi Program dan Anggaran Tingkat Kabupaten/ Kota Yang Diterima Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang**

No	Nama Program	Besar Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1.	Dana Pemberdayaan Masy. Kelurahan	500.000.000	66,35
2.	Dana Operasional Rutin Kelurahan	250.000.000	33,17
3.	BOP LPMK	2.500.000	0,35
4.	BOP BKM	1.000.000	0,13
Jumlah		753.500.000	100

Sumber : Monografi Kelurahan (2012)

Dari Tabel 10 dapat diketahui distribusi program dan jumlah anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota yang diterima Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang adalah sebagai berikut. Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 500.000.000,- (66,35%) pada program Dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (33,17%) pada program Dana Operasional Rutin Kelurahan, anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (0,35%) pada program BOP LPMK, anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- (0,13%) pada program BOP BKM.

## 2) Data Keuangan

**Tabel 11**  
**Data Keuangan Kelurahan Tanjungrejo**  
**Kecamatan Sukun Kota Malang**

No.	Sumber Keuangan	Besar Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1.	Anggaran Kelurahan (APBD	-	
2.	Kab./Kota)	-	
3.	SKPD	-	
	Sumber Lain:	-	
	Pemerintah Pusat	-	
	Pemerintah Provinsi	503.500.000	100
	Pemerintah Kabupaten/Kota	-	
	Hibah/Bantuan Luar Negeri	-	
	Sumbangan/Bantuan Lain Yang Tidak Mengikat	-	
	Swadaya	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>503.500.000</b>	<b>100</b>

Sumber: Monografi Kelurahan (2012)

Dari Tabel 11 dapat diketahui sumber keuangan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang yaitu sebagai berikut. Sumber keuangan Anggaran Kelurahan (APBD Kab./Kota) tidak terdapat anggaran (0%), begitupula yang bersumber dari SKPD (0%), Ataupun

sumber lainnya seperti Pemerintah Pusat (0%), Pemerintah Provinsi (0%), Hibah/BLN (0%), Sumbangan/Bantuan Tidak Mengikat (0%), serta sumber Swadaya (0%). Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp. 503.500.000,- (100%) merupakan satu-satunya sumber keuangan yang diterima Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

### 3) Anggaran Lembaga

**Tabel 12**

**Anggaran Lembaga Yang Dikelola Oleh Kelurahan Tanjungrejo  
Kecamatan Sukun Kota Malang**

N o.	Nama Lembaga	Jumlah Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1.	LPM	2.500.000	50
2.	PKK	2.500.000	50
3.	Karang Taruna	-	
4.	RT	-	
5.	RW	-	
6.	Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	-	
Jumlah		5.000.000	100

Sumber : Monografi Kelurahan (2012)

Dari Tabel 12 dapat diketahui anggaran lembaga yang dikelola oleh Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang adalah sebagai berikut: Anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (50%) dikelola oleh lembaga LPM, anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (50%) dikelola oleh PKK. Sedangkan lembaga masyarakat Karang Taruna, RT, RW serta Lembaga Kemasyarakatan Lainnya tidak terdapat anggaran yang dikelola (0%).

#### 4) **Kondisi Kesehatan**

Kondisi kesehatan di kelurahan Tanjungrejo pada umumnya masih relatif rendah, sehingga masih diperlukan adanya perhatian dari pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh. Ini terbukti dengan masih banyak dijumpai kartu – kartu kesehatan masyarakat salah satunya yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS ). Setiap hari tampak di pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas dipenuhi warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Satu posyandu dan satu poliklinik yang dimiliki Kelurahan Tanjungrejo merupakan tumpuan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, sarana dan prasarana yang ada perlu dilengkapi sehingga memadai untuk akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Wawancara yang dilakukan dengan Mumpuni Karya Utami selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat pada 9 Desember 2013 pukul 08.30 yang menyatakan bahwa :

“ Jumlah penerima kartu JAMKESMAS sebanyak 1273. Kesehatan masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo sudah cukup baik, apalagi sejak diadakannya JAMKESMAS dan JAMKESDA yang selama ini cukup membantu masyarakat “

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa pemerintah sudah berusaha meningkatkan kesehatan masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya kemudahan masyarakat miskin dalam mengakses kesehatan berupa diadakannya JAMKESMAS .

### 5) Kondisi Pendidikan

Masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo pada umumnya taraf pendidikannya masih relatif rendah. Kebanyakan masyarakatnya masih lulusan SD. Sementara masih terdapat anak-anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai biaya pendidikan anaknya. Hal ini perlu mendapatkan penanganan yang serius agar anak yang putus sekolah dapat lagi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi minimal bisa sampai program pemerintah yaitu wajib belajar sembilan tahun. Untuk menangani hal tersebut perlu dioptimalkannya program anak asuh dan pemberian beasiswa kepada anak yang kurang mampu sehingga anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa terus melanjutkan sekolah.

Wawancara yang dilakukan dengan Mumpuni Karya Utami selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat pada 9 Desember 2013 pukul 08.30 yang menyatakan bahwa :

“ tingkat pendidikan di Kelurahan Tanjungrejo sudah cukup baik, bahkan walaupun orang tuanya bekerja sebagai pengamen dan pengemis, mereka mengusahakan anaknya agar bisa sekolah minimal tingkat SMK bahkan ada yang anaknya sampai sekolah ke perguruan tinggi “

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa pemerintah sudah berusaha meningkatkan pendidikan masyarakat

### 6) Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk kelurahan Tanjungrejo beraneka ragam antara lain: Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta, tani, pertukangan, buruh tani, jasa dan pemulung. Masih banyak dijumpai

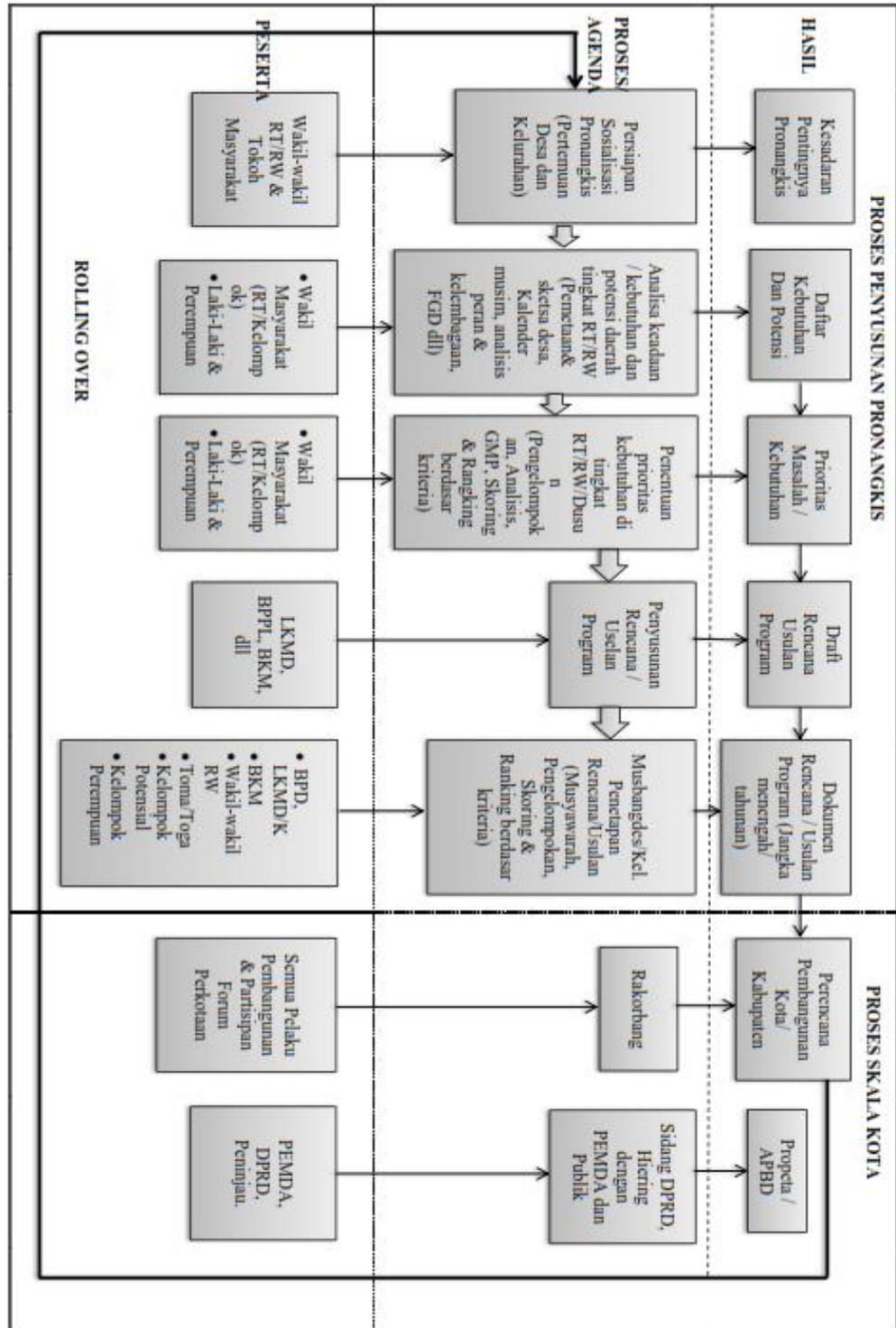
warga yang ekonominya cukup rendah. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya warga yang mata pencahariannya sebagai pemulung, pengamen dan bahkan pengemis. Selain itu masih banyaknya pengangguran juga menjadi persoalan yang mendesak untuk segera ditangani agar masyarakat bisa hidup dengan layak dan sejahtera. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan pemberian bantuan modal serta pelatihan kerja terutama bagi usia angkatan kerja.

#### 7) **Kondisi Lingkungan**

Secara umum kondisi lingkungan di Kelurahan Tanjungrejo dalam kondisi baik. Pada tahun 2007 dengan adanya program PNPM Mandiri di Kelurahan Tanjungrejo telah banyak membantu mengatasi masalah lingkungan karena Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri sebagian diprioritaskan untuk pemberdayaan lingkungan. Ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dan perbaikan saluran air. Di Kelurahan Tanjungrejo juga telah berdiri LPMK yang bisa menjadi mitra untuk pembangunan dibidang lingkungan. Namun demikian, tidak semua permasalahan lingkungan dapat diatasi mengingat di Kelurahan Tanjungrejo adalah kawasan padat penduduk dan masih ada beberapa warga yang membuang sampah ke sungai. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi terkait kebersihan lingkungan agar masyarakat nantinya bisa hidup dengan lingkungan yang sehat.

Gambar 1

Bagan Pronangkis Kelurahan Tanjungrejo



Sumber : Buku PJM Kelurahan Tanjungrejo ( 2011

## 2. Profil BKM Tanjungrejo

Salah satu program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah PNPM. Diharapkan masyarakat bisa keluar dari kemiskinan dan hidup secara mandiri. PNPM diluncurkan di tingkat kelurahan agar semakin dekat dengan masyarakat. Lembaga ini dibentuk secara sendiri dan demokratis, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, tidak mencampuri dalam proses pembentukannya.

Sebelum pembentukan lembaga-lembaga itu, pemerintah dalam hal ini TKPP ( terdiri dari beberapa satuan unit kerja di lingkungan pemerintah) melakukan sosialisasi untuk membantu masyarakat memahami PNPM secara tuntas. Selain itu TKPP bersama dengan sebuah perusahaan penyedia konsultan dan beberapa orang faskel (fasilitator kelurahan ) yang ditugasi melakukan pendampingan langsung terhadap kelompok masyarakat miskin di kelurahan .

Lembaga yang pertama kali dibentuk adalah KSM ( Kelompok Swadaya Masyarakat) kelompok ini berada di wilayah RT yang secara obyektif menetapkan jumlah warga yang layak mendapatkan bantuan. KSM kemudian berkumpul dan membentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) lembaga yang menangani langsung pronangkis ( Program Penanggulangan Kemiskinan) di kelurahan. Keanggotaan BKM terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih dan dipercaya.

Setelah terbentuk dan menerima data dari KSM tentang jumlah warga miskin beserta kebutuhannya, BKM menyusun PJM (Program Jangka Menengah) pronangkis untuk kurun waktu 3-5 tahun. PJM itu merupakan

daftar kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Selain itu, untuk membantu kinerja BKM dalam pengelolaan keuangan dan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dari PNPM, BKM membentuk UPK (Unit Pengelola Keuangan) sebagai unit kerja dan bertanggung jawab langsung kepada BKM.

UPK mempunyai tugas memegang rekening BKM, yang setiap saat dapat mengajukan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat ke Bank yang ditunjuk PNPM. Ini bukti pemerintah tidak memegang dana bantuan atau uang rakyat. Rekening BLM tidak masuk rekening masyarakat via BKM. Masyarakat diizinkan mengembangkan sendiri dana yang diterima sesuai aturan. Disinilah wujud upaya PNPM memproses kemandirian masyarakat.

PNPM di Kelurahan Tanjungrejo di mulai pada tahun 2007 yang awalnya bernama P2KP. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjungrejo lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya PNPM telah membantu masalah lingkungan, karena Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM sebagian juga diprioritaskan untuk pemberdayaan lingkungan. Adanya PNPM tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan, melainkan juga untuk membantu menguatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo. Salah satu programnya yaitu melalui pinjaman bergulir yang diberikan kepada warga kurang mampu untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo sangat antusias dengan program tersebut, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan

pinjaman, yang biasanya dipakai untuk wirausaha membuka warung, menjahit, membuat pabrik boneka dan lain-lain. Pada warga yang ingin meminjam dana PNPM diwajibkan memenuhi kriteria yang sudah disediakan dalam formulir serta membuat proposal per satu KSM. Persyaratan khusus yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar sebagai anggota KSM yaitu menunjukkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk sebagai warga asli kelurahan Tanjungrejo dan surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW. Tahap selanjutnya yaitu survey, yang menyatakan layak dan tidaknya warga tersebut mendapatkan pinjaman yang nantinya akan diputuskan lewat hasil rapat antar pengurus.

Pembentukan Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) Tanjungrejo berawal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perkotaan secara bersama, mandiri, berkelanjutan, melalui pendekatan kelembagaan masyarakat. Melalui serangkaian proses pemilihan Calon anggota LKM di level basis, hingga akhirnya dilaksanakan pemilihan anggota di level desa/Kelurahan yang diikuti oleh calon anggota LKM hasil pemilihan di level basis, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa dan warga peduli serta lembaga desa lainnya. Sebelum pelaksanaan anggota LKM, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan AD/ART LKM. Setelah semua warga yang hadir memberikan suaranya, dilakukan penghitungan suara dan perangkingan jumlah suara bagi calon anggota LKM. Hasil perangkingan itu menjadi dasar untuk menentukan anggota LKM dan koordinator LKM.

Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tanjungrejo berawal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perkotaan secara bersama, mandiri dan berkelanjutan melalui suatu pendekatan kelembagaan masyarakat yang berbasis pada prinsip dan nilai-nilai serta penyediaan dana langsung kepada masyarakat di kelurahan.

Melalui serangkaian proses pemilihan calon anggota LKM di level basis, hingga akhirnya dilaksanakan pemilihan anggota di level kelurahan yang diikuti oleh Calon Anggota LKM hasil pemilihan di level basis, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa dan warga peduli serta lembaga desa lainnya sebelum pelaksanaan pemilihan anggota LKM, terlebih dahulu dilakukan penyepakatan AD/ART LKM. Setelah semua warga yang hadir memberikan suaranya, selanjutnya dilakukan penghitungan suara dan perangkaan jumlah suara bagi calon anggota LKM. Hasil perangkaan itu menjadi dasar untuk menentukan anggota LMK dan koordinator LKM.

BKM Tanjungrejo adalah organisasi masyarakat warga yang otonom dan independen dibentuk oleh masyarakat melalui para utusan masyarakat di tingkat kelurahan dalam rembug masyarakat Tanjungrejo dengan tujuan utama melakukan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi dan menanggulangi kemiskinan dengan cara menumbuhkan kembali ikatan dan solidaritas sosial antar warga masyarakat untuk saling bekerjasama demi kebaikan masyarakat Tanjungrejo.

Selain itu Tujuan didirikannya BKM Tanjungrejo yaitu untuk membangun modal sosial (*Social Capital*) dengan maksud menanggulangi kemiskinan masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo.

Upaya- upaya BKM Tanjungrejo dalam menanggulangi kemiskinan sebagai berikut :

a. Aspek Sosial

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan mandiri
2. Menurunkan angka penderita kekurangan gizi
3. Menurunkan angka kelahiran tidak terencana
4. Mengurangi angka siswa putus sekolah
5. Mengurangi jumlah masyarakat buta huruf

b. Aspek Lingkungan

1. Meningkatkan kualitas lingkungan
2. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni
3. Menurunkan jumlah rumah yang tidak punya jamban
4. Meningkatkan jumlah warga pengguna air bersih

c. Aspek ekonomi

1. Meningkatkan pendapatan warga
2. Mengurangi jumlah pengangguran
3. Meningkatkan perekonomian melalui pemberian modal usaha

Bentuk dari upaya BKM Tanjungrejo dalam menanggulangi kemiskinan tergambar dalam perencanaan jangka menengah program

penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) tahun 2009-2013 yang mencakup aspek tridaya yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial.

Rembug Warga Tahunan (RWT) merupakan wujud dari kedaulatan warga untuk melakukan kontrol terhadap lembaga yang telah diberikan amanah oleh warga untuk mengelola kegiatan pembangunan khususnya upaya untuk penanggulangan kemiskinan di kelurahan.

#### a. Struktur Organisasi BKM Tanjungrejo

##### 1) Peran Utama BKM Tanjungrejo

Peran utama dari BKM Tanjungrejo adalah :

- a) Sebagai lembaga yang dipimpin secara kolektif-kolegial dari Organisasi Masyarakat yang dibentuk Badan Swadaya Masyarakat dan berfungsi utama sebagai pengambil keputusan yang dilakukan melalui proses demokrasi dan partisipasi, independen serta transparan.
- b) Sebagai sumber inspirasi dalam membangun prakarsa dan kepentingan warga secara damai, berupaya membangun dan memberdayakan kepentingan warga dalam memecahkan persoalan dan/atau menyatakan kepedulian, utamanya untuk menanggulangi kemiskinan dengan tetap menghargai pihak lain untuk berbuat hal yang sama dengan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi).
- c) Sebagai Organisasi masyarakat, BKM Tanjungrejo diharapkan benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat miskin, agar secara aktif dan inspektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

- d) Sebagai Organisasi Masyarakat, BKM Tanjungrejo merupakan Wadah Perjuangan serta Penyatuan Aspirasi dan Inspirasi warga masyarakat kelurahan Tanjungrejo, khususnya dalam usaha penanggulangan kemiskinan.

## 2) Unit Pengelola Organisasi BKM

Unit pengelolaan organisasi LKM terdiri dari :

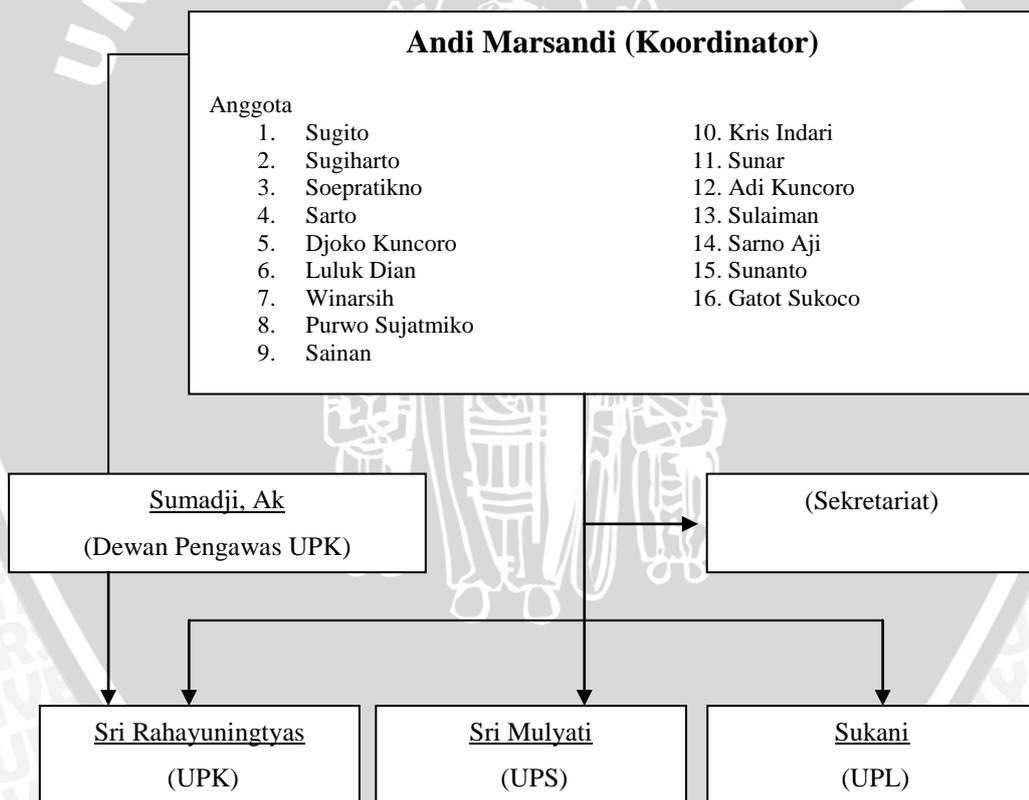
- a) Sekretariat, sebagai unsur pelaksanaan harian dan tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota pimpinan kolektif LKM.
- b) Dewan Pengawas, Dewan Pengawas UPK berjumlah 3 atau 5 orang dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan, diangkat untuk melakukan proses pengawasan, monitoring, evaluasi maupun audit internal kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK ) dan tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota Pimpinan Kolektif LKM.
- c) Unit Pengelola Keuangan (UPK) berjumlah 2 atau 4 orang dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan, diangkat untuk mengendalikan keuangan dalam kegiatan ekonomi / perguliran dan tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota pimpinan kolektif LKM dan pengawas UPK.
- d) Unit Pengelola Lingkungan (UPL ) diangkat untuk mengendalikan kegiatan lingkungan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia dan tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota pimpinan kolektif LKM.

- e) Unit Pengelola Sosial (UPS) diangkat untuk mengendalikan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh KSM dan tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota pimpinan kolektif LKM.
- f) Unit pengelola kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### 3) Struktur Organisasi

Gambar 2

#### Struktur Organisasi BKM Tanjungrejo



Sumber : Data dokumenter BKM Tanjungrejo

## B. Penyajian Data Fokus Penelitian

### 1. Upaya Pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat

#### a. Penguat Kelembagaan

Upaya dalam menguatkan kelembagaan sangat diperlukan dukungan dan kerjasama yang dilakukan dengan lembaga-lembaga lain ataupun dengan kelompok masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator BKM Tanjungrejo Andi Marsandi yaitu:

“Kemitraan juga ada. Untuk kerjasama biasanya dengan dinas terkait diantaranya : BKBP, DKP, PU, Dinsos dan Dinkes Bentuk kerjasama yang dilakukan biasanya berupa kegiatan dan penyuluhan selain itu juga mengadakan kerjasama dengan kelembagaan yang ada di Kelurahan Tanjungrejo“. **(Sumber : Wawancara Selasa 29 oktober 2013, pukul 8.10 WIB)**

#### 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia di BKM Tanjungrejo dapat dilihat dari pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh BKM Tanjungrejo seperti yang telah diungkapkan oleh koordinator BKM yaitu Andi Marsandi yaitu :

“ Dalam rangka meningkatkan kualitas pengurus BKM Tanjungrejo selama ini kita telah mengadakan pelatihan-pelatihan diantaranya pelatihan komputer, pelatihan otomotif dan lain sebagainya. Di samping itu kami juga mengirimkan anggota kami khususnya pengurus BKM untuk mengikuti diklat yang diadakan oleh dinas terkait diantaranya Dinas sosial, dinas Kesehatan dll.”

**“(Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.35 WIB)**

Sejalan dengan pernyataan Andi Marsandi diatas, anggota BKM yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yaitu Sri

Rahayuningtyas selaku Unit Pengelola Keuangan yang menyatakan bahwa :

“ Selama ini saya telah mengikuti diklat yang diadakan oleh BKM Tanjungrejo, saya rasakan banyak manfaat yang saya peroleh saat mengikuti diklat, diantaranya saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan keuangan “  
**(Sumber : Wawancara, rabu 4 Desember 2013, pukul 9.52 WIB)**

Hal senada juga disampaikan oleh Sugiharto yang menyatakan bahwa :

“ Diklat yang diadakan BKM Tanjungrejo sangat bermanfaat, saya dulu pernah mengikuti terkait kerelawanan, banyak ilmu yang saya peroleh dan tentunya bisa bertemu dengan anggota yang lain “

**(Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 10.05 WIB)**

Adapun jenis-jenis pelatihan yang selama ini telah dilaksanakan oleh BKM Tanjungrejo yang ditujukan untuk kader maupun pengurus diantaranya :

1. Pelatihan kader posyandu
2. Pelatihan daur ulang sampah
3. Pelatihan komposing
4. Pelatihan komputer
5. Pelatihan tekhnisi otomotif
6. Pelatihan ketrampilan membatik
7. Pelatihan sablon dan percetakan

**(Sumber : Buku PJM BKM Tanjungrejo 2012)**

Pelatihan– pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat bagi masyarakat Tanjungrejo guna menambah kemampuan mereka

sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka Koordinator BKM Tanjungrejo Andi Marsandi mengungkapkan :

“Pelatihan yang kami adakan pasti sangat bermanfaat karena itu merupakan modal untuk mandiri, mengasah keterampilan masyarakat sehingga nanti bisa digunakan sebagai bekal untuk hidup“

**(Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.35 WIB)**

Sejalan dengan pernyataan tersebut, perwakilan warga yaitu Sri Winarsih yang mengikuti pelatihan juga menyampaikan bahwa :

“saya senang sekali dengan pelatihan yang diadakan oleh BKM Tanjungrejo, karena bisa menambah pengetahuan saya khususnya dalam meningkatkan ekonomi keluarga saya“**(Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.43 WIB)**

Pelatihan yang diadakan oleh pengurus BKM Tanjungrejo baik yang ditujukan untuk pengurus BKM maupun untuk masyarakat sejauh ini sudah cukup bermanfaat. Pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia selain itu juga menambah ilmu pengetahuan guna meningkatkan perekonomian di Kelurahan Tanjungrejo.

## 2) Pengakuan dan Dukungan Masyarakat

Pengakuan dan dukungan dari masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam lembaga tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator BKM Tanjungrejo Andi

Marsandi yaitu :

“Masyarakat Antusias dalam kegiatan yang diadakan oleh BKM, karena masyarakat sudah mengetahui apa itu pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM . Kalau zaman dulu kan pakai hutang-hutangan dan setelah ada BKM masyarakat jadi tahu tentang pemetaan pemberdayaan “

**(Sumber : Wawancara Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.35 WIB)**

Sejalan dengan pernyataan tersebut, perwakilan warga yaitu Sri Winarsih yang juga menyampaikan bahwa :

“Saya sangat mendukung dengan program-program yang diadakan BKM, karena setelah ada BKM saya bisa mendapat pinjaman modal, dengan bunga yang sangat ringan “.(**Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.43 WIB**)

Hal senada juga disampaikan oleh Supardi warga Kelurahan Tanjungrejo, yang menyatakan bahwa :

“ Setelah ada BKM banyak sekali pembangunan fisik yang diadakan di Kelurahan Tanjungrejo diantaranya pembuatan gorong-gorong, sumur resapan, perbaikan jalan dll. Hal ini tentunya sangat menyenangkan, karena mempermudah akses warga dalam menjalankan kehidupannya” (**Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.43 WIB**)

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan program PNPM DI Kelurahan Tanjungrejo yang diadakan oleh BKM dengan bekerjasama melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan lain seperti : LPMK, RT, RW, PKK dan lain sebagainya dapat digambarkan melalui kegiatan daur ulang sampah dan pembuatan komposing. Kegiatan tersebut menandakan kepedulian masyarakat untuk kerjasama dan mengasah kreatifitas, guna meningkatkan perekonomian yang lebih baik lagi.

Keaktifan masyarakat dalam mengikuti program-program BKM dapat terlihat dari jumlah kehadiran masyarakat dalam Rapat Warga Tahunan (RWT) yang diadakan oleh BKM. Daftar peserta yang hadir dalam Rapat Warga Tahunan (RWT) dapat dilihat di

lampiran. Sebagaimana yang dikatakan Sri Rahayuningtyas selaku Unit Pengelola Keuangan yang menyatakan bahwa :

“Warga cukup antusias dengan diadakanya Rapat Warga Tahunan (RWT) hal ini terlihat dari prosentase kehadiran warga yang datang lumayan banyak, yaitu sekitar 70 % “.

**(Sumber : Wawancara, rabu 4 Desember 2013, pukul 9.52 WIB)**

Sejalan dengan pernyataan Sri Rahayuningtyas di atas, warga masyarakat Pardi yang menyatakan bahwa :

“ Saya dan warga disini sangat senang setelah ada BKM karena kami merasa terbantu baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan diantaranya yaitu peminjaman modal, perbaikan jalan dll“. **(Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 10.43 WIB).**

Keikutsertaan warga dalam menghadiri Rapat Warga Tahunan (RWT) memang cukup banyak, hal ini dapat terlihat dari prosentase kehadiran warga. Walaupun Rapat Warga Tahunan (RWT) yang diadakan tidak selalu dihadiri seluruh perwakilan tiap KSM. KSM yang perwakilannya tidak hadir dalam Rapat Warga Tahunan (RWT) harus tetap melaporkan kondisi dan keadaan dari KSM serta menerima keputusan apapun yang diputuskan dalam Rapat Warga Tahunan (RWT) tersebut. (Lampiran : Daftar Hadir Anggota KSM).

## b. Upaya Membangun Jaringan Kerjasama

Sejalan dengan pernyataan Andi Marsandi di atas Sri Rahayuningtyas selaku Unit Pengelola Keuangan yang menyatakan bahwa :

“ Selama ini BKM Tanjungrejo juga menjalin kemitraan dengan beberapa dinas terkait, selain itu juga bekerja sama dengan LPMK, RT, RW, PKK guna sosialisasi program dan lain-lain“. (Sumber : Wawancara, rabu 4 Desember 2013, pukul 9.52 WIB).

Kerjasama BKM dengan Kelurahan Tanjungrejo, LPMK, PKK, RT, RW dan masyarakat setempat yang telah dilaksanakan seperti dalam kegiatan-kegiatan pembangunan Kelurahan Tanjungrejo yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dapat dilihat dibawah ini :

1. Pembangunan pavingisasi RW II dan RW III
2. Perbaikan jalan dan gorong-gorong RW I dan RW X
3. Pembangunan saluran air RW VI dan RW IX
4. Pembuatan gorong-gorong dan pembuatan sumur resapan RW X
5. Bedah rumah RW I dan RW II
6. Pembuatan jamban umum RW VII
7. Pembuatan MCK RW IX
8. Pemberian modal usaha RW I
9. Pendirian rumah jompo RW I
10. Pelatihan pemberdayaan TOGA RW IV
11. Penambahan sarana sekolah RW IX
12. Penambahan PMT balita RW III dan RW IV
13. Pendirian klinik lingkungan dan apotek lingkungan RW VII

(Sumber : PJM Pronangkis BKM Tanjungrejo : 2012 )

Selain itu BKM Tanjungrejo menyusun program lanjutan untuk BKM bersama-sama dengan Lembaga Kemasyarakatan lain (LPMK, RW, RT, PKK dan pejabat Kelurahan ) antara lain :

1. Sosialisasi berkelanjutan tentang program PNPM
2. Ketertiban BKM dalam program pembangunan Kelurahan
3. Melakukan pemetaan swadaya secara berkelanjutan
4. Melakukan pembinaan terhadap KSM ekonomi produktif secara berkesinambungan.

### c. Upaya Sebagai Mediator dan Fasilitator

Upaya BKM dalam mengeluarkan masyarakat dari belenggu kemiskinan menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat guna meningkatkan keberdayaan dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator BKM Tanjungrejo Andi Marsandi yaitu :

“ BKM ini sebagai wadah yang menampung aspirasi warga dan juga berusaha memberi fasilitas kepada warga untuk dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengentaskan kemiskinan.dimulai dengan perencanaan program, kegiatan pelatihan dan menjalin kerjasama dengan semua pihak baik internal maupun eksternal kelurahan”. **(Sumber : Wawancara Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.35 WIB).**

Sebagaimana yang dikatakan Sri Rahayuningtyas selaku Unit Pengelola Keuangan yang menyatakan bahwa

“ Selama ini BKM Tanjungrejo selalu mengusahakan yang terbaik untuk warga mulai dari program, pemberian fasilitas, kemudahan pelayanan dll **(Sumber : Wawancara, rabu 4 Desember 2013, pukul 9.52 WIB).**

Sejalan dengan pernyataan Sri Rahayuningtyas di atas,

warga masyarakat Pardi yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya BKM saya bisa mengeluarkan pendapat saya dalam sebuah rapat, aspirasi warga yang lain juga ditampung. Kalau lingkungan kita terasa ada yang perlu diperbaiki, biasanya kita membuat proposal yang selanjutnya akan di seleksi dan di proses oleh BKM“.(Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 10.43 WIB).

Dalam hal ini BKM berperan sebagai mediator dan fasilitator bagi masyarakat. Adapun cara – cara yang dilakukan BKM Tanjungrejo sebagai mediator dan fasilitator bagi masyarakat diantaranya :

#### 1. Jaringan Usaha

BKM yang mempunyai tujuan utama yakni mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan ditunjuk pemerintah sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat, karena diharapkan mampu berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan di masyarakat.

Tindakan yang dilakukan BKM Tanjungrejo sebagai Mediator untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan membantu masyarakat dalam mengelola usaha yang telah dibuat menggunakan modal dari PNPM diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan terhadap KSM produksi unggulan BKM mempunyai tugas untuk mendata KSM-KSM yang unggul dalam kelurahan agar dapat lebih dikembangkan lagi.
- b. Merencanakan kegiatan untuk promosi produk unggulan produk dari KSM yang unggul dapat menjadi tugas BKM yang berperan sebagai mediator dalam mempromosikan produk unggulannya.

c. Melakukan perencanaan jaringan usaha antar KSM dan berusaha agar bisa menjangkau lebih luas.

## 2. Pelatihan

BKM Tanjungrejo juga memberi pelatihan kepada masyarakat, dalam hal ini BKM Tanjungrejo berperan sebagai fasilitator. Tujuan dari diadakannya pelatihan yaitu untuk memberi bekal baik berupa ilmu ataupun langsung praktek. BKM berperan untuk memfasilitasi pengadaan pelatihan tersebut. Peran BKM sebagai fasilitator sebagai penyelenggara pelatihan bagi masyarakat ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelatihan untuk KSM sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan bagi KSM, dalam hal ini BKM bertugas sebagai fasilitator.
- c. Memberi dukungan penuh terhadap pelatihan tersebut dengan harapan pelatihan itu nantinya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
- d. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk merencanakan pelatihan bagi masyarakat.

## 3. Kelancaran Angsuran

BKM Tanjungrejo berperan sebagai mediator bagi pemerintah dalam mengelola perguliran dana yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, yang diharapkan dengan adanya perguliran dana tersebut dapat dijadikan sebagai modal bagi masyarakat untuk

berwiraswasta. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan BKM untuk mengawasi perguliran dana tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Membuat rekapitulasi tunggakan KSM setiap bulan dan melaporkannya kepada masyarakat.
  - b. Merencanakan langkah-langkah agar dapat menekan tunggakan KSM
  - c. Melakukan pendataan terhadap KSM yang lancar yang nantinya akan diikutsertakan pada pemilihan KSM terbaik
4. Hubungan Masyarakat
- a. Membuat pemetaan hubungan kelembagaan yang ada di BKM Tanjungrejo
  - b. Menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga di luar Kelurahan Tanjungrejo

( Sumber : Buku Pedoman Teknis BKM Tanjungrejo, 2009)

#### **d. Upaya Penyediaan Modal, Sarana dan Prasarana**

##### **1) Penyediaan Modal**

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi dalam masyarakat. Penyediaan modal bagi masyarakat menjadi prioritas utama untuk menunjang perekonomian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator BKM Tanjungrejo Andi Marsandi yaitu :

“Dana BKM Tanjungrejo berasal dari APBN dan APBD untuk pencairannya dibagi menjadi 3 tahap“. (Sumber : Wawancara Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.35 WIB)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, perwakilan warga yaitu Sri Winarsih yang juga menyampaikan bahwa :

“Selama menjalankan usaha saya mendapatkan pinjaman modal dari BKM, saya merasa sangat senang karena prosesnya mudah, orangnya ramah dan bunganya sangat rendah. Saya jualan sayur, awalnya dulu juga mendapat modal dari BKM , sampai sekarang saya juga masih mengangsur. Berkat BKM saya bisa membuka usaha dan bisa meningkatkan perekonomian keluarga“. **(Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.43 WIB).**

Hal senada juga disampaikan oleh Supardi warga Kelurahan Tanjungrejo, yang menyatakan bahwa :

“saya penjual es, saya mengetahui bahwa memang ada sebagian warga yang mengajukan modal usaha ke BKM, akhirnya warga bisa membuka usaha dan bisa meningkatkan kegiatan perekonomian di Kelurahan Tanjungrejo ini. Selain itu semakin dimudahkannya akses jalan terlihat dari sudah dilaksanakannya pembangunan gorong-gorong, jalan, sumur resapan dll“. **(Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.43 WIB).**

Anggaran Dasar BKM Tanjungrejo dalam pasal 28 menyebutkan bahwa sumber keuangan BKM Tanjungrejo berasal dari :

- a. Dana bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).
- b. Dua prosen (2%) dari jumlah usulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh BKM sebagai Biaya Operasional Proyek (BOP).
- c. Satu setengah persen (1,5%) dari jasa dana pinjaman di KSM.
- d. Bantuan pihak lain yang sah/ tidak mengikat. (Sumber : Anggaran Dasar BKM Tanjungrejo).

Sebagaimana disampaikan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Tanjungrejo Sri Rahayuningtyas mengungkapkan :

“Dana berasal dari APBN dan APBD. Dana yang cair pada periode sebelumnya Rp. 250.000.000 untuk pencairannya melalui 3 tahap. Tahap pertama cair Rp. 150.000000 tahap ke dua cair Rp. 100.0000.000. Dana digunakan untuk melaksanakan program tridaya diantaranya pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan “. **(Sumber : Wawancara, rabu 4 Desember 2013, pukul 9.52 WIB).**

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa dana BKM berasal dari dana APBN dan APBD yang pencairannya terbagi menjadi 3 tahap.

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan BKM untuk dapat menjalankan tugasnya dalam masyarakat. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang dimiliki BKM nantinya juga akan berpengaruh terhadap kinerja BKM itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Tanjungrejo Sri Rahayuningtyas mengungkapkan :

“Dana berasal dari Pemerintah Daerah yaitu Rp. 1.0000.0000 setiap tahun“. **(Sumber : Wawancara, rabu 4 Desember 2013, pukul 9.52 WIB).**

Berikut ini adalah inventaris yang dimiliki BKM Tanjungrejo.

**Tabel 6**  
**Inventaris BKM Tanjungrejo Tahun 2013**

No.	Inventaris	Jumlah
1.	Komputer	1 Unit
2.	Meja tulis	4 Unit
3.	Papan Pengumuman	3 Unit
4.	Komputer	1 Unit
5.	Almari besi	1 unit

3) Sumber : Buku Pedoman Teknis BKM Tanjungrejo, 2013

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan BKM

### a. Faktor Pendukung

Ketika menjalankan tugasnya di masyarakat dalam upaya memberantas kemiskinan BKM Tanjungrejo tentunya mempunyai faktor-faktor yang mendukung terlaksananya program BKM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator BKM Tanjungrejo Andi Marsandi yaitu :

“Tidak ada ketua, hanya ada koordinator, selain itu setiap keputusan dimusyawarahkan terlebih dahulu dan yang paling penting tidak melibatkan partai politik “(Sumber : Wawancara Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.35 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan Sri Rahayuningtyas selaku Unit Pengelola Keuangan yang menyatakan bahwa :

“ Faktor pendukung BKM bisa sejauh ini, ya karena tingkat kepedulian pengurus yang tinggi terhadap masyarakat miskin khususnya, selain itu juga banyaknya tokoh masyarakat yang turut membantu. Yang paling membuat semangat ya ketika orang-orang miskin yang merasa senang setelah mendapat bantuan dari BKM“  
(Sumber : Wawancara, rabu 4 Desember 2013, pukul 9.52 WIB)

Sejalan dengan pernyataan Sri Rahayuningtyas di atas, warga masyarakat Pardi yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya BKM banyak rumah yang sudah diperbaiki, selain itu terkadang juga ada PMT (Program Makanan Tambahan ) untuk balita dan lansia tidak hanya itu kami juga bisa mengajukan modal usaha“. (**Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 10.43 WIB**).

BKM Tanjungrejo juga mendapat dukungan dari RT dan RW setempat dalam melaksanakan Program PNPM yaitu dengan cara mensosialisasikan BKM kepada masyarakat untuk tergabung dalam KSM. Menurut hasil wawancara dengan ketua BKM sosialisasi yang dilakukan selama ini bekerjasama dengan ketua RT setempat.

#### **b. Faktor Penghambat**

Program PNPM yang menunjuk BKM dalam upaya menjalankan tugasnya guna menanggulangi kemiskinan perkotaan selama ini tidak lepas dari adanya hambatan-hambatan yang dilalui. Sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator BKM Tanjungrejo Andi Marsandi yaitu :

“ Hambatannya biasanya hanya terkandala alam, ya relatif lah itu selain itu juga kurangnya sosialisasi kepada warga terkait pinjaman bergulir. Masyarakat menganggap bahwa dana pinjaman bergulir adalah hadiah yang tidak harus dikembalikan “. (**Sumber : Wawancara Selasa 29 oktober 2013, pukul 9.35 WIB**)

Sebagaimana yang dikatakan Sri Rahayuningtyas selaku Unit

Pengelola Keuangan yang menyatakan bahwa :

“ Faktor penghambat BKM diantaranya para pengurus BKM ini tidak mendapat gaji kecuali UPK, oleh karena itu terkadang pengurus tidak profesional dalam menjalankan tugasnya terkadang malah cenderung malas-malasan. Kesibukan anggota yang sebagian masih mementingkan kepentingan pribadi terlebih dahulu tidak hanya itu kegiatan yang ada dalam program jaraknya terlalu dekat dengan pencairan dana sehingga, para pengurus harus kerja cepat untuk membuat laporan akhir tahun “. (**Sumber : Wawancara, rabu 4 Desember 2013, pukul 9.52 WIB**)

Warga masyarakat yaitu Pardi yang menyatakan bahwa :

“Secara keseluruhan BKM sudah cukup membantu masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, namun masih perlu diperhatikan lagi terkait siapa saja yang diberi modal, jangan hanya orang yang dekat dengan pengurus, tetapi lebih ke siapa saja yang membutuhkan selain itu juga kalau bisa jalan poros di depan gang saya segera di perbaiki karena sudah banyak yang berlubang dan kalau turun hujan sering banjir “. (Sumber : Wawancara, Selasa 29 oktober 2013, pukul 10.43 WIB).

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa faktor yang menjadi penghambat pemberdayaan di Kelurahan Tanjungrejo adalah :

1. Faktor alam biasanya berupa hujan deras, tanah longsor dan angin kencang
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
3. Pola pikir masyarakat yang menyimpang yang menganggap bahwa pinjaman bergulir adalah hadiah untuk masyarakat yang tidak harus mengembalikan, padahal sebenarnya dana pinjamannya harus dikembalikan.
4. Para pengurus BKM tidak mendapat gaji sehingga kinerjanya kurang optimal. (Lampiran : Perhitungan Nilai Risiko BKM).

### C. Analisa Data Penelitian

#### a. Upaya Pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Tujuan pemberdayaan menurut Mintarti (2011) diantaranya:

- a. Memberdayakan masyarakat bertujuan "mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri" atau
- b. "membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri" (*to help people to help themselves*)
- c. Bekerja dengan masyarakat (*working with people*) (Juhari, 2011:98) Pemberdayaan seharusnya lebih diarahkan pada upaya kolektif yang ditujukan untuk membantu masyarakat lokal menjembatani isu-isu

sosial dengan kebutuhan mereka melalui potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Dalam upaya pemberdayaan, BKM dapat melakukan strategi seperti yang disarankan Suharto (2009:66-67) dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu :

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

Tahap awal yang perlu dilakukan dalam upaya pemberdayaan BKM adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap individu dari para pengurus BKM terlebih dahulu. Dengan mengadakan pelatihan keahlian bagi setiap individu sesuai dengan peran dan fungsinya dalam BKM agar mereka lebih efektif dan efisien dalam melakukan tugas dan kewajiban dalam lembaga tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi adanya kesalahan-kesalahan dari setiap individu dalam menjalankan tugasnya dan untuk dapat meningkatkan keahlian mereka sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik.

b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok,

biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pemberdayaan ini dilakukan langsung pada lembaga yang akan diberdayakan dengan pemberian pelatihan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Hal ini dimaksudkan agar BKM memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan baik dari internal lembaga maupun permasalahan yang datang dari luar.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*Large System Strategi*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang masyarakat sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Pada tahap ini BKM Tanjungrejo belum dapat membuat kebijakan yang mempengaruhi masyarakat secara luas.

a. Penguat Kelembagaan BKM

Adapun prinsip pemberdayaan menurut Mashoed (2004 :31) diantaranya:

1. Partisipasi

Bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan dimulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestarian.

2. Keswadayaan  
Pengembangan program didasarkan atas pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat dan dilaksanakan dengan mendayagunakan seoptimal mungkin potensi dan kemampuan lokal.
3. Transparan dan akuntabel  
Informasi yang berkenaan dengan pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas.
4. Keterpaduan  
Program yang dikembangkan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Otonomi dan desentralisasi  
Masyarakat desa bersama pemerintah desa diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas dalam pengelolaan kegiatan.
6. Kesetaraan gender  
Kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
7. Keberlanjutan  
Pengelolaan program yang mampu menumbuhkan peran serta masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan kegiatan dalam pengentasan kemiskinan.

Peran kelembagaan dalam pemberdayaan memang sangat diperlukan, berdasarkan informasi yang tercantum dalam SOP BKM yang dikolaborasikan dengan hasil wawancara penulis dengan warga serta pengurus BKM maka dapat disimpulkan peran yang sudah dilaksanakan BKM selama ini diantaranya :

1. Pengambilan keputusan dengan proses demokrasi, hal ini terlihat dengan pemilihan pengurus yang dilakukan secara langsung oleh warga.
2. Sebagai sumber inspirasi dalam membangun prakarsa warga secara damai, indikasi peran BKM dalam hal ini dapat terlihat dari tingkat partisipasi perwakilan warga yang datang dalam rapat cukup banyak yaitu 70%.

3. BKM mampu memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat miskin secara aktif, yaitu berupa pengajuan proposal yang diusulkan oleh warga setempat yang selanjutnya akan diproses oleh BKM.
4. BKM mampu menjadi lembaga yang independen, terbukti dengan tidak adanya partai politik yang ikut campur dalam setiap pengambilan keputusan.
5. BKM mampu menjadi lembaga yang transparan, terbukti dari adanya LPJ yang dilakukan oleh pengurus BKM, selain itu dalam pelaporan keuangan juga sudah terdapat dalam papan pengumuman.

#### **1) Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Menurut Sumodiningrat yang dikutip dalam Mashoed (2004:40) upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan adalah :

1. Bantuan dana sebagai modal.
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi rakyat.
3. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat.
4. Pelatihan bagi aparat dan masyarakat.
5. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi rakyat

Dalam point ke empat disebutkan bahwa salah satu upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan mengadakan pelatihan bagi aparat dan masyarakat. Sejauh ini, BKM Tanjungrejo sudah sering mengadakan pelatihan baik untuk pengurus BKM maupun masyarakat.

Lebih lanjut Mashoed (2004:30) ada pendekatan tri daya untuk melindungi keluarga miskin dari ketidakberdayaan :

1. Pemberdayaan manusia yang diarahkan pada :  
Peningkatan sumber daya manusia. Baik fisik maupun non fisik dan Peningkatan pendidikan, kesehatan dan memberikan perlindungan serta jaminan sosial.
2. Pemberdayaan Usaha yaitu:  
Meningkatkan kesempatan kerja, kegiatan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan dan penyediaan modal kerja dalam bentuk pinjaman.
3. Pemberdayaan lingkungan  
Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan serta lingkungan usaha, dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang memadai sehingga meningkatkan akses perekonomian dan pemanfaatan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

## 2) Pengakuan dan Dukungan Masyarakat

Dalam upaya penguatan kelembagaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan dengan teori 5P, yaitu:

- a. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat yang berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah serta mencegah terjadinya

eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominansi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupan. Pemberdayaan harus menyokong masyarakat agar tidak jatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Penyokongan dan dukungan masyarakat Kelurahan Tanjungrejo terhadap kelembagaan BKM Tanjungrejo dapat dilihat dari banyaknya jumlah KSM di Kelurahan Tanjungrejo yaitu 259 KSM ekonomi, 12 KSM infrastuktur, 6 KSM sosial dengan anggota berjumlah 128 orang. Banyaknya masyarakat yang bergabung dalam KSM sebagai bentuk upaya masyarakat untuk perbaikan keadaan ekonomi mereka dengan memanfaatkan dana PNPM ini sebagai modal usaha ataupun memperbesar/mengembangkan usaha yang telah mereka buat. Pada pengembangan usaha ekonomi produktif tampak bahwa masyarakat

mempunyai daya kreativitas untuk dapat melakukan diversifikasi usaha dalam rangka peningkatan ekonominya.

### **b. Upaya Pembangunan Jaringan Kerjasama**

Menurut Mashoed (2004:40) upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan empat langkah :

1. Strategi dasar sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan.
2. Kerangka rencana makro yang membuat berbagai sasaran yang harus dicapai.
3. Masyarakat sendiri harus memiliki perkiraan sumber-sumber pembiayaan.
4. Kerangka dan perangkat kebijakan berupa program pembangunan pedesaan.

Sejauh ini BKM Tanjungrejo berusaha membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait baik dari intern maupun ekstern Kelurahan.

Diantaranya : RT,RW, PKK, Dinkes, Dinsos dan PU.

### **c. Upaya Sebagai Mediator dan Fasilitator**

Berbagai peranan kelembagaan lokal adalah:

#### **a. Informasi**

Lembaga lokal menyajikan data sejumlah permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal, baik menyangkut permasalahan ekonomi dan sosial budaya serta mencoba menemukan alternatif pelayanan sosial yang dibutuhkan.

#### **b. Moderator dan Fasilitator**

Kadangkala terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Adanya kesenjangan ini akan menyebabkan terjadinya konflik antara

kepentingan dengan kebutuhan masyarakat. Pada batas-batas tertentu, masyarakat ini tidak akan mendukung kegiatan pembangunan ini. lembaga lokal pun berkewajiban untuk dapat menjadi fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diadakan di daerahnya.

c. Advokasi

Kelembagaan masyarakat mewakili kepentingan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dari pihak-pihak tertentu. Ketika ada pihak lain yang menawarkan program kepada masyarakat, namun program tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, maka organisasi lokal atas nama masyarakat lokal akan melakukan upaya pembelaannya. Seperti dalam pembebasan tanah untuk kepentingan perumahan atau industri atau pembangunan industri yang polusinya dirasakan oleh masyarakat.

d. Pemberdayaan

Kelembagaan lokal melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat. Dengan adanya upaya pemberdayaan oleh organisasi lokal maka masyarakat secara swadaya dapat menyelesaikan permasalahannya baik menyangkut bidang ekonomis maupun sosial budaya dan politik.

Sebagai mediator dan fasilitator BKM Tanjungrejo menjadikan lembaga sebagai seorang pemandu atau guru bagi masyarakat untuk mendukung, mendampingi masyarakat dalam upaya pengembangan masyarakat dan melepaskan masyarakat dari kantong-kantong kemiskinan BKM Tanjungrejo sudah mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi

masyarakat Tanjungrejo sehingga dalam proses pemberdayaan ini masyarakat berani mengemukakan pendapatnya. BKM Tanjungrejo sebagai fasilitator guna menangani kemiskinan di Kelurahan Tanjungrejo pun memosisikan diri sebagai narasumber masyarakat karena tugas dari BKM disini bukan hanya melepaskan masyarakat dari kemiskinan namun harus dapat membuat masyarakat tersebut berdaya pula agar mereka tidak jatuh kembali dalam kantong kemiskinan.

#### **d. Upaya Penyediaan Modal, Sarana dan Prasarana**

##### **1) Penyediaan Modal**

Salah satu upaya dalam melakukan pengembangan kelembagaan adalah dengan pemberian modal. Modal yang cukup akan membuat suatu lembaga lebih kuat dan berdaya.

Penyediaan modal yang diberikan pemerintah melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada BKM Tanjungrejo diberikan hampir tiap tahun. Data terakhir yang diperoleh dari lapangan, pada tahun 2010 terdapat dana modal Rp 20.000.000,00 , pada tahun 2011 terdapat modal sebesar Rp. 80.000.000,00 , tahun 2012 dan 2013 tidak ada dana modal. Dana modal tersebut yang nantinya harus dikelola oleh BKM dengan menggulirkan dana ini kepada masyarakat. Tujuan pemerintah dengan pemberian dana ini adalah agar dapat membuat lembaga dan masyarakat dapat berdaya dalam mengelola perekonomian mereka keuangannya untuk dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Namun adanya kendala-

kendala di lapangan seperti ketidaklancaran dalam pemberdayaan dana sehingga membuat modal yang diberikan pemerintah tersebut menjadi tersendat-sendat penyalurannya untuk masyarakat.

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang ada di BKM Tanjungrejo merupakan hasil dari pengelolaan dana BLM yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan program PNPM. Penyediaan sarana dan prasarana diperoleh dari jasa atau keuntungan dana bergulir kepada masyarakat. Dana dari prosentase keuntungan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk inventaris BKM. Kelengkapan inventaris BKM yang dimiliki BKM Tanjungrejo saat ini sudah tergolong cukup baik dan lengkap.

## 2) Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

### a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pemberdayaan BKM Tanjungrejo adalah:

- 1) Adanya kerjasama yang baik antar para pengurus BKM, disini dapat terlihat bahwa ikatan kekeluargaan yang terjadi begitu erat. Jika ada anggota yang tidak dapat hadir maka yang lain akan merasa kehilangan, karena hampir setiap hari mereka bertemu di BKM Tanjungrejo. Hal seperti ini sangat baik untuk pengembangan organisasi ke depan, dengan adanya kekerabatan yang erat maka loyalitas juga akan kuat sehingga diharapkan ke depan BKM Tanjungrejo bisa lebih maju.

- 2) Adanya dukungan dari masyarakat yang begitu antusias dengan program PNPM ini, sehingga membuat para pengurus BKM Tanjungrejo menjadi lebih semangat dalam menjalankan tugasnya. Adanya kekerabatan yang terjalin antara para pengurus BKM Tanjungrejo dengan masyarakat dapat membuat kerjasama dan produktivitas yang lebih baik.
- 3) Adanya hubungan kemitraan antara BKM Tanjungrejo dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang berada di Kelurahan Tanjungrejo seperti RT, RW, LPMK, PKK, Karang Taruna dan pihak Kelurahan Tanjungrejo selain dukungan dari pihak intern BKM Tanjungrejo juga mendapat dukungan dari pihak ekstern yaitu bekerjasama dengan Dinkes, Dinsos, DKP dan PU sehingga BKM lebih mudah dalam menjalankan program-programnya karena adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak.
- 4) Dukungan dari pemerintah dapat dilihat dari pengadaan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas sumber daya BKM guna penguatan BKM itu sendiri. Pelatihan yang diberikan tidak hanya untuk pengurus BKM tapi juga untuk masyarakat, agar masyarakat bisa lebih berdaya dan dapat mengembangkan kreativitas yang dimiliki.
- 5) Adanya komunikasi yang baik antara pengurus BKM Tanjungrejo dengan masyarakat. Para petugas yang ramah dan murah senyum

menyebabkan masyarakat sangat antusias dengan program –program BKM.

#### **b. Faktor Penghambat**

Adapun Permasalahan-permasalahan yang ada dalam BKM Tanjungrejo yang selanjutnya menjadi faktor penghambat yaitu,antara lain :

- 1) Kesibukan-kesibukan pribadi pengurus dan anggota yang tidak bisa dihindari sehingga tidak sedikit tugas-tugas/bidang-bidang yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Untuk aktif di kantor BKM setiap hari sangat sulit, oleh karena itu para pengurus BKM Tanjungrejo lebih banyak bekerja di tempat mereka. Jika ada rapat bulanan mereka baru datang dan melaporkan masalah apa yang ada di lingkungan mereka.
- 2) Pengurus BKM tidak mendapat gaji, selama ini hanya bersifat sukarela. Sehingga para pengurus BKM dirasa kurang profesional dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Tidak semua pengurus BKM melaksanakan tugasnya dengan baik yang mengakibatkan kinerja BKM kurang maksimal.
- 4) Pencairan dana dari pemerintah pusat jaraknya terlalu dekat dengan pelaksanaan program, sehingga pengurus BKM harus bekerja lebih keras dalam menuliskan laporan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Upaya BKM Tanjungrejo dalam pemberdayaan masyarakat sudah menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini dapat terlihat dari masyarakat Tanjungrejo yang sudah mulai lebih mandiri, aktif dan kreatif guna meningkatkan keberdayaan dirinya. Adanya kerjasama yang baik antara pengurus BKM dan warga menjadi salah indikator tercapainya tujuan yang diinginkan, yaitu mengentaskan kemiskinan di kelurahan Tanjungrejo. Salah Satu Upaya BKM dalam memberdayakan kelembagaan dari segi pengembangan sumber daya manusia yaitu seringnya BKM Tanjungrejo mengadakan pelatihan- pelatihan untuk para pengurus guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa melaksanakan tugasnya lebih baik lagi, selain untuk pengurus BKM KM Tanjungrejo pelatihan juga diadakan untuk masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan kretivitas dan produktivitas masyarakat. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan masyarakat bisa lebih berdaya dan bisa keluar dari belenggu kemiskinan. Walaupun pelatihan yang diberikan sudah cukup banyak namun masih dirasa kurang efektif, karena pelatihannya tidak berkelanjutan. Terlepas dari hal itu,dukungan masyarakat Kelurahan Tanjungrejo terhadap keberadaan BKM sudah cukup menunjang dengan banyaknya masyarakat yang bergabung dalam KSM-KSM dalam rangka pelaksanaan program PNPM. Partisipasi masyarakat yang tinggi membuat program-program yang diadakan BKM Tanjungrejo sejauh ini berjalan dengan lancar.

Adanya hubungan kemitraan yang baik antara BKM Tanjungrejo dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang berada di Kelurahan Tanjungrejo sendiri maupun dari pihak luar yang membantu program-program dapat dilaksanakan.

## B. Saran

Dalam meningkatkan aktivitas BKM Tanjungrejo hendaknya pemerintah mencari peluang bisnis guna meningkatkan perekonomian, sehingga masyarakat bisa lebih mandiri. Selain itu nantinya, laba yang didapat bisa digunakan untuk memberi gaji bagi para pengelola BKM, mengingat selama ini para pengurus sama sekali tidak pernah memperoleh gaji atau uang transport. Lebih lanjut pemberian *reward* juga diperlukan bagi pengurus yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik agar kedepan bisa lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya jika terdapat pengurus yang tidak menjalankan tugasnya maka sebaiknya juga diberikan *punishment* agar kedepan bisa lebih baik lagi. selanjutnya pelatihan individu baik untuk pengurus dan masyarakat sebaiknya konsisiten dan berkelanjutan sehingga hasil yang didapatkan nantinya lebih fokus dan maksimal. Selain dari faktor SDM perbaikan juga perlu dilakukan dalam hal pelaksanaan program, salah satunya yaitu sosialisasi kepada masyarakat yang lebih aktif lagi, mengingat ada sebagian masyarakat yang belum mengerti tentang program-program BKM. Diharapkan kedepan BKM Tanjungrejo lebih terbuka dan dapat merangkul semua lapisan masyarakat yang lebih luas lagi, agar semua masyarakat

bisa merasakan hasil dari program-program BKM tanpa terkecuali. Sehingga masyarakat kelurahan Tanjungrejo nantinya bisa keluar dari jeratan kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. <http://www.pekalongankota.go.id/>. *Kota Pekalongan Jadi Sorotan Dunia* di akses pada tanggal 4 oktober 2012 pukul.15.02
- Anonymous. <http://tnp2k.go.id/> *Kebijakan Percepatan*. Diakses pada tanggal 13 oktober 2012 pukul 12.50
- Badan perencanaan pembangunan dengan universitas brawijaya malang. 2006. *Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang*. Malang
- Basuki, Ananto. 2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang : SPOD FE Universitas Brawijaya
- Chavchay, Syaifullah . 2008. *Generasi Muda Menolak Kemiskinan* . Klaten : Cempaka Putih
- Departemen pemukiman dan parsarana wilayah direktorat jenderal perumahan dan pemukiman. 2007. *Pegangan pelaku kader masyarakat*.
- Fahrudin, adi . 2011. *Pemberdayaan , partisipasi dan penguatan kapasitas masyarakat* . Bandung: Humanoria
- Hikmat, Harry .2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Koswara, E. 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Mitchell, Aileen. 2002. *Empowering people (pemberdayaan sumber daya manusia)* . Yogyakarta: Kanisius.
- Nasirin, Chairun. 2010. *Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Malang : Indo Press
- Nasirin, Chairun. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Good Governance*. Malang : Indo Press
- Nugroho. Rino A. *Pengantar Administrasi Pembangunan*.  
<http://rinoan.staff.uns.ac.id/files/2009/02/pengantar.pdf> di akses pada tanggal 13 oktober 2012 pukul.15.42
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga

- PNPM Mandiri Perkotaan.2007. *Pedoman Teknis Tinjauan Partisipatif*. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Setiawan, Iwan. 2012. *Dinamika pemberdayaan petani* . Jawa barat: Widya padjajaran
- Soetomo. 2011 . *Pemberdayaan masyarakat* . Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Setara press
- Sudantoko, Djoko. 2003. *Dilema Otonomi Daerah*. Jakarta : ANDI
- Sudarwati, Ninik. 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. Malang : Intimedia
- Suhartini. 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Suharto,Edi. 2009. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: CV. ALFABETA
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: ALFABETA
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa, menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemebrdayaan masyarakat*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo
- Suwandi, dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Suyono , Haryono. 2003 . *ekonomi keluarga pilar utama Keluarga sejahtera* . Jakarta : yayasan dana sejahtera mandiri
- Suyono,haryono. 2003 . *Memotong Rantai Kemiskinan*. Jakarta : Yayasan dana sejahtera mandiri
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi – Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB press
- Sutiah, Ning. 2003. *Membangun Tahta Rakyat*. Malang : LPKP Jawa Timur  
bekerja sama dengan CSSP USAID

Syeiful, Oky. 2011. *Mencari Indonesia meninjau masa lalu Menatap Masa Depan*. Sumedang: LPPMD unpad

Suyono , Haryono. 2003 . *Mewujudkan kemandirian keluarga kurang mampu* . Jakarta : Yayasan dana sejahtera mandiri

Tjiptoherijanto, Prijono. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: UI press

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wignyosoebroto, Soetandyo. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Williem, Stephane 2003. *Institutional Capacity and Climate Action*. Paris : Organisation for economic and development

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Ar-ruzz media

Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Zuriah, Nurul. 2005. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

